

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
JAKARTA 2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV maupun satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi keuangan maupun akuntabilitas instansi .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam Tahun 2019 yang berisi gambaran serta penilaian secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan. Diharapkan dengan telah disusunnya laporan ini, akan bermanfaat dan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Jakarta, 4 Februari 2020

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
I.1 Latar Belakang	I - 1
I.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
I.3 Sumber Daya Manusia	I - 10
I.4 Sistematika Laporan	I - 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019	II - 1
II.1 Perencanaan Strategis.....	II - 1
II.2 Perjanjian Kinerja.....	II - 1
II.3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018	II - 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019	III - 1
III.1 Capaian Kinerja.....	III - 1
III.2 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	III - 3
III.3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018	III - 8
III.4 Analisa Efisiensi Pembangunan Sumber Daya	II - 57
BAB IV PENUTUP	IV - 1
IV.1 Kesimpulan	IV - 1
IV.2 Langkah Kedepan	IV - 1

DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I - 11
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I - 11
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (awal).....	
II.2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Terakhir).....	II - 2
III.2.1	Pencapaian Kinerja Setditjen Hubla Tahun 2019.....	III - 3
III.3.1	Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat	III - 8
III.3.2	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	
III.3.3	Jenis Diklat	III - 8
III.3.4	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	III - 11
III.3.5	Persentase Keandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 13
III.3.6	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).....	
III.3.7	Tabel Skala Likert	III - 14
III.3.8	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 15
III.3.8	Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla.....	III - 16
III.3.9	Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	III - 17
III.3.10	Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	III - 18
III.3.11	Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun.....	III - 19
II.3.12	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun.....	III - 20
III.3.13	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan.....	III - 21

III.3.14	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan.....	III - 23
III.3.15	Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	III - 24
III.3.16	Jumlah penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	III - 25
III.3.17	Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	
III.3.18	Daftar Kategori Kasus Disiplin Pegawai Tahun 2019.....	III - 27
III.3.19	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan...	III - 28
III.3.20	Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan	III - 30
III.3.21	Jumlah Penyelesaian Perkara.....	III - 31
III.3.22	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.....	III - 33
III.3.23	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral....	III - 35
III.3.24	Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional	III - 36
III.3.25	Persentase Penatausahaan Adinistrasi Perkantoran.....	III - 38
III.3.26	Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan.....	III - 39
III.3.27	Nilai BMN pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut.....	III - 40
III.3.28	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat.....	III - 41
III.3.29	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler	III - 42
III.3.30	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi.....	III - 44
III.3.30	Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB.....	III - 45
III.3.31	Jumlah Dokumen RB yang Disusun.....	III - 46
III.3.32	Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek	III - 47
III.3.33	Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla.....	III - 49
III.3.34	Jumlah Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10)	III - 50
III.3.35	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun.....	III - 51
III.3.36	Persentase penyerapan anggaran Setditjen Hubla.....	II - 52

III.3.37	Nilai kinerja anggaran Setditjen Hubla.....	III - 53
III.3.38	Nilai BMN Setditjen Hubla.....	III - 54
III.3.39	Target PNBPN Setditjen Hubla.....	III - 55

DAFTAR GRAFIK

III.3.1	Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat	III - 10
III.3.2	Persentase Keandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 13
III.3.3	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)	III - 14
III.3.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	III - 16
III.3.5	Prosentase Penyerapan Anggaran	III - 17
III.3.6	Jumlah Dokumen SAKIP dan dokumen lainnya	III - 18
III.3.7	Prosentase Penyerapan Anggaran	III - 19
III.3.8	Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun	III - 20
III.3.9	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun	III - 21
III.3.10	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan.....	III - 22
III.3.11	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan	III - 23
III.3.12	Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Terkait Peningkatan Kompetensi	III - 25
III.3.13	Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	III - 26
III.3.14	Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	III - 27
III.3.15	Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan yang Ditetapkan.....	III - 30
III.3.16	Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan	III - 31
III.3.17	Jumlah Penyelesaian Perkara	III - 42
III.3.18	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.....	III - 33
III.3.19	Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral	III - 35
III.3.20	Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional.....	III - 37
III.3.21	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	III - 38

III.3.22	Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan	III - 39
III.3.23	Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut.....	III - 40
III.3.24	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat.....	III - 41
III.3.25	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler.....	III - 43
III.3.26	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi	III - 44
III.3.27	Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB	III - 45
III.3.28	Jumlah Dokumen RB yang Disusun	III - 47
III.3.29	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	III - 48
III.3.30	Jumlah Sistem dan Informasidi Lingkungan Setditjen Hubla	III - 49
III.3.31	Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla	III - 50
III.3.32	Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun	III - 51
III.3.33	Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla	III - 53
III.3.34	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla.....	III - 54
III.3.35	Nilai BMN Setditjen Hubla	III - 55
III.3.36	Target PNBPN Setditjen Hubla.....	III - 56



BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2019 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan strategik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana Strategis ditetapkan sejumlah Sasaran Strategis. Pemenuhan atas

sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima. Apabila tujuan stratejik organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersiapkan telah memenuhi visi dan misinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025,
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan,
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah,

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013,
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan,
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(KM. 189 TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM No. 86 tahun 2016)



TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SETDITJEN HUBLA

a. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 56 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 122 Tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
3. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
4. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
6. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- 1) Bagian Perencanaan;
- 2) Bagian Keuangan;
- 3) Bagian Kepegawaian;
- 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 5) Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- 6) Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1) Bagian Perencanaan

a) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Bagian Perencanaan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2) Bagian Keuangan

a) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

b) Fungsi Bagian Keuangan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

(2) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan

(3) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, - 134 - penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.

3) Bagian Kepegawaian

a) Tugas Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

b) Fungsi Bagian Kepegawaian

(1) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri

Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

a) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

b) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- (1) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- (2) Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

5) Bagian Umum dan Perlengkapan

a) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan..

b) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

6) Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

a) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi

informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2019 yaitu 349 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1.	S3	0	0
2.	Spesialis	0	0
3.	S2	44	42
4.	S1	116	125
5.	D4	2	2
6.	D3	60	60
7.	D2	0	0
8.	D1	2	2
9.	SLTA	120	103
10	SLTP	7	4
11.	SD	4	2
TOTAL		355	340

- 2) Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.2 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	1	0
3.	IV/c	0	1
4.	IV/b	4	3
5.	IV/a	5	7
6.	III/d	58	54
7.	III/c	47	58
8.	III/b	89	103
9.	III/a	66	41
10	II/d	29	35
11.	II/c	32	27
12.	II/b	20	9
13.	II/a	3	1
14.	I/d	1	1
15.	I/c	0	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
TOTAL		355	340

I.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada RENSTRA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 14 (Empat belas) Sasaran Strategis dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2015 – 2019) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015 – 2019.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015 – 2019. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 disusun setelah DIPA Tahun 2019 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memuat pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel II.2.1

Perjanjian Kinerja tahun 2019 (Awal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Target 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Costumer Perspectives					
SS.1	Terselenggaranya administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase peningkatan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
		IKU.2	Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.3	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert</i> 1-5).	Nilai	4
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	82
		IKU.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
Internal Business Process Perspective					
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5
		IKU.7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Kegiatan	50
		IKU.8	Jumlah studi dan kajian yang disusun	Dokumen	2

SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akuntabel	IKU.9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disusun	Dokumen	302
		IKU.10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
		IKU.11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah penyelenggaraan diklat dan bimtek terkait peningkatan kompetensi	Kegiatan	8
		IKU.13	Jumlah penerbitan SK mutasi/ kenaikan pangkat/ jabatan fungsional	SK	4142
		IKU.14	Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	100
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20
		IKU.16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8
		IKU.17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6
		IKU.19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2
		IKU.20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Kegiatan	18
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	IKU.21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100
		IKU.22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100
		IKU.23	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	54.178.537.670.155

SS.8	Meningkatnya kinerja kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	5
		IKU.25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14
SS. 9	Meningkatnya kinerja pengelolaan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2
SS. 10	Terlaksananya fungsi manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4
		IKU.28	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2
Learn and Growth Perspective					
SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	30
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1
		IKU.31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9
SS.13	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di S Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.14	Terkelolanya anggaran Sekretariat Direktorat	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90

Jenderal Perhubungan Laut secara Optimal	IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
	IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	17.474.651.000
	IKU.36	Target PNBK Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	61.792.762.561

Tabel II.2.2
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Terakhir)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Target 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Customer Perspectives					
SS.1	Terselenggaranya administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase peningkatan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
		IKU.2	Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.3	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert</i> 1-5).	Nilai	4
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	82
		IKU.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
Internal Business Process Perspective					
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di	IKU.6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5
		IKU.7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Kegiatan	50

	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.8	Jumlah studi dan kajian yang disusun	Dokumen	2
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akuntabel	IKU.9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disusun	Dokumen	302
		IKU.10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
		IKU.11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah penyelenggaraan diklat dan bimtek terkait peningkatan kompetensi	Kegiatan	8
		IKU.13	Jumlah penerbitan SK mutasi/ kenaikan pangkat/ jabatan fungsional	SK	4142
		IKU.14	Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	100
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20
		IKU.16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8
		IKU.17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6
		IKU.19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2
		IKU.20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Kegiatan	18
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	IKU.21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100
		IKU.22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100
		IKU.23	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	54.178.537.670.155

SS.8	Meningkatnya kinerja kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	5
		IKU.25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14
SS. 9	Meningkatnya kinerja pengelolaan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2
SS. 10	Terlaksananya fungsi manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4
		IKU.28	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2
Learn and Growth Perspective					
SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	30
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1
		IKU.31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9
SS.13	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di SSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.14	Terkelolanya anggaran Sekretariat Direktorat	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90

Jenderal Perhubungan Laut secara Optimal	IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
	IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	17.474.651.000
	IKU.36	Target PNBPN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	61.792.762.561





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pada tahun anggaran 2019 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian kelima sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah merumuskan beberapa indikator Kinerja. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya di atas 80% dan apabila pencapaiannya di bawah 80 % maka dianggap kurang berhasil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



III.2 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Tabel III.2.1
Pencapaian Kinerja Setditjen Hubla Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.1	Terselenggaranya Administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase Peningkatan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	90	83,53	88,24	95,07	96,40	96,40	107,11
		IKU.2	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKU.3	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).	Nilai	4	0	0	0	4	4	100
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	97	0	0	0	0	0	0,00
		IKU.5	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90,50	7,06	24,98	47,80	89,98	89,98	99,43

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.2	Terlaksananya Perencanaan, Pemograman, Penganggaran, Monev Dan Pentarifan Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah Dokumen Dan Laporan Yang Disusun Terkait SAKIP Dan Dokumen Lainnya	Dokumen	5	4	5	5	5	5	100
		IKU.7	Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, Dan Koordinasi Terkait SAKIP Dan Dokumen Lainnya	Kegiatan	50	11	23	30	50	50	100
		IKU.8	Jumlah Studi Dan Kajian Yang Disusun	Dokumen	2	0	0	2	2	2	100
SS.3	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Akuntabel	IKU.9	Jumlah Dokumen Dan Laporan Keuangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Disusun	Dokumen	302	302	302	302	302	302	100
		IKU.10	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi Di Bidang Keuangan	Kegiatan	6	2	3	4	6	6	100
		IKU.11	Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Di Bidang Keuangan	Kegiatan	6	2	3	5	6	6	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.4	Terlaksananya Fungsi Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dan Bimtek Terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	0	0	3	10	10	125
		IKU.13	Jumlah Penerbitan SK Mutasi/ Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional	SK	4142	1462	4548	4998	6127	6127	147,9
		IKU.14	Persentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai Yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	%	100	33,75	62,5	80	100	100	100
SS.5	Meningkatnya Pemenuhan Dan Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	IKU.15	Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan Yang Ditetapkan	Dokumen	10	2	3	9	9	9	90
		IKU.16	Jumlah Peraturan Perundangan Yang Telah Di Sosialisasikan	Dokumen	8	0	2	2	5	5	62,5
		IKU.17	Jumlah Penyelesaian Perkara	Dokumen	5	0	0	0	2	2	40
SS.6	Meningkatnya Kerjasama Nasional Dan Internasional	IKU.18	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	6	3	3	6	9	9	150
		IKU.19	Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0
		IKU.20	Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional Dan Internasional	Kegiatan	18	1	1	5	14	14	77,78

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.7	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan Dan Penatausahaan	IKU.21	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	%	100	36,84	48,29	54,03	93,05	93,05	93,05
		IKU.22	Persentase Pelaksanaan Administrasi Dan Operasional Kerumahtanggaan	%	100	13,24	31,88	48,85	85,73	85,73	85,73
		IKU.23	Nilai BMN Pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	59.137.268.800.155,00	55.074.532.350.671	54.429.468.029.601	54.778.274.170.426	55.661.604.024.873	55.661.604.024.873	94,12
SS.8	Meningkatnya Kinerja Kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	Kegiatan	5	2	5	5	5	5	100
		IKU.25	Jumlah Kegiatan Kehumasan Dan Protokoler	Kegiatan	14	6	6	12	16	16	114,29
SS.9	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Pemeliharaan Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Kegiatan	2	1	3	3	3	3	150
SS.10	Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Sosialisasi Terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4	0	1	3	4	4	100
		IKU.28	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2	0	0	0	2	2	100
SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Kompeten Dan Profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Mengikuti Diklat / Bimtek	Orang	133	0	11	92	133	133	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.12	Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah Sistem Dan Informasi Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1	0	0	0	1	1	100
		IKU.31	Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9	0	0	0	8	8	88,89
SS.13	Terwujudnya <i>Good Governance</i> Dan <i>Clean Government</i> Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	Dokumen	5	5	5	5	5	5	100
SS.14	Terkelolanya Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Secara Optimal	IKU.33	Persentase Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	91,09	16,61	34,49	54,47	94,40	94,40	103,63
		IKU.34	Nilai kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	91,09	18,23	37,86	59,80	103,63	103,63	113,77
		IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3.938.416.805.293	3.919.059.604.360	3.781.447.093.583	3.412.687.621.759	2.928.729.182.276	2.928.729.182.276	74,36
		IKU.36	Target PNPB Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	61.792.762.561	22.143.491.184	41.355.202.294	62.446.555.369	85.328.279.782	85.328.279.782	138,09

III.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS (1)

Sasaran strategis **Terselenggaranya Administrasi Ditjen Hubla** terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) **Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat**

Tabel III.3.1

Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.1	Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	90	83,53	88,24	95,07	96,40	96,40	107,11

Sumber data : Bagian Kepegawaian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) orang, Triwulan II realisasi 7.942 (tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua) orang, Triwulan III realisasi 8.556 (delapan ribu lima ratus lima puluh enam) orang, Triwulan IV realisasi 8. 676 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) orang, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 107.11% melebihi target yang ditetapkan di awal yaitu 90% melebihi target yang ditetapkan di awal yaitu 90% dari ASN 7.290 orang.

Baseline 2018 : 6.899

Realisasi th 2019 : 1.777

Kumulatif s.d 2019 : 8.676

Tabel III.3.2

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

	TW I	TW II	TW III	TW IV
TARGET (90% x 8.100)	7.290	7.290	7.290	7.290
CAPAIAN	7.518	7.942	8.556	8.676

Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2019 jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis) sebanyak 8.676 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) orang dan khusus di tahun anggaran 2019 realisasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis) sebanyak 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari :

Tabel III.3.3

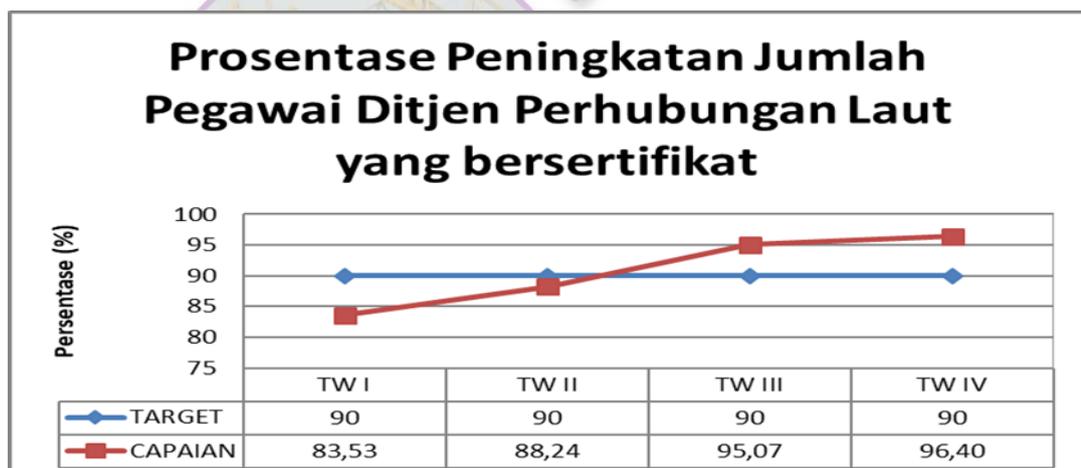
Jenis Diklat

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	Penanganan Muatan Berbahaya Angkata I	30
2	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal I	30
3	Pengukuran Kapal I	30
4	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran I	30
5	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran II	30
6	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal II	30
7	Penanganan Muatan Barang Berbahaya II	30
8	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	26
9	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran III	30
10	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran IV	30
11	Pencegahan Pencemaran I	30
12	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran V	30
13	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran VI	30
14	ISPS Code I	30
15	Maritime English I	30
16	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut I	28
17	Penyelenggara Pelabuhan dan Otoritas I	23
18	Auditor ISM Code I	26
19	SBNPTingkat Dasar I	30
20	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran VII	30
21	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran VIII	29
22	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran IX	30
23	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran X	30
24	Pencegahan Pencemaran II	30
25	Kesyahbandaran klas B I	30
26	Dasar Bintara KPLP I	30
27	ISPS Code II	30
28	VTS (Operator) I	30
29	Sea And Coast Guard I	29
30	Maritime English II	27
31	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut II	23
32	ISPS Code III	25
33	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	28
34	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal II	29

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
35	Maritime English III	30
36	Pengukuran Kapal III	30
37	VTS (Operator) II	31
38	Pengukuran Kapal III	30
39	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XI	30
40	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XII	30
41	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal IV	30
42	Port State Control (PSC) I	30
43	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XIII	30
44	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XIV	30
45	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XV	30
46	Maritime English IV	30
47	Penanganan Muatan Barang Berbahaya III	30
48	Penanganan Muatan Barang Berbahaya IV	30
49	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XVI	30
50	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XVII	30
51	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran XVIII	30
52	Port Management	30
53	Basic Safety Training	60
54	TOT 6.09	29
55	TOE 3.12	30
56	Bendahara Pengeluaran	15
57	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XIX	30
58	Pencegahan Pencemaran III	30
59	Maritime English V	30
60	Penanganan Muatan Barang Berbahaya V	30
JUMLAH		1.777

Grafik III.3.1

Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat



Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2019 jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis) sebanyak 7.682 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) orang, dan khusus di tahun anggaran 2019 realisasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis) sebanyak 783 (tujuh ratus delapan tiga) orang yang terdiri dari :

Tabel III.3.4

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	Penanganan Muatan Berbahaya Angkatan I	30
2	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Angkatan I	30
3	Pengukuran Kapal Angkatan I	30
4	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan I	30
5	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan II	30
6	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Angkatan I	30
7	Penanganan Muatan Berbahaya Angkatan II	30
8	Penanggulangan Pencemaran Tk. I Angkatan I	26
9	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan III	30
10	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan IV	30
11	Pencegahan Pencemaran Angkatan I	30
12	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan V	30
13	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan VI	30
14	ISPS Code Angkatan I	30
15	Maritime English Angkatan I	30
16	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut Angkatan I	28
17	Penyelenggaraan Pelabuhan dan Otoritas	23
18	Auditor ISM Code Angkatan I	26
19	SBNP Tingkat Dasar	30
20	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan VII	30
21	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan VIII	29
22	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan IX	30
23	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan X	30
24	Pencegahan Pencemaran Angkatan II	30
25	Kesyahbandaran Kelas B Angkatan I	30
26	Dasar Bintara KPLP Angkatan I	30
27	ISPS Code Angkatan II	30
28	VTS (Operator) I	30
29	Sea And Coast Guard I	29
30	Maritime English II	27
31	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut	23
32	ISPS Code III	25
33	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	28
34	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal II	29
35	Maritime English III	30

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
36	Pengukuran Kapal III	30
37	VTS (Operator) II	31
38	Pengukuran Kapal III	30
39	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XI	30
40	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XII	30
41	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal IV	30
42	Port State Control (PSC) I	30
43	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XIII	30
44	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XIV	30
45	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XV	30
46	Maritime English IV	30
47	Penanganan Muatan Barang Berbahaya III	30
48	Penanganan Muatan Barang Berbahaya IV	30
49	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XVI	30
50	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XVII	30
51	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran Angkatan XVIII	30
JUMLAH		1494

2) Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Tabel III.3.5

Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

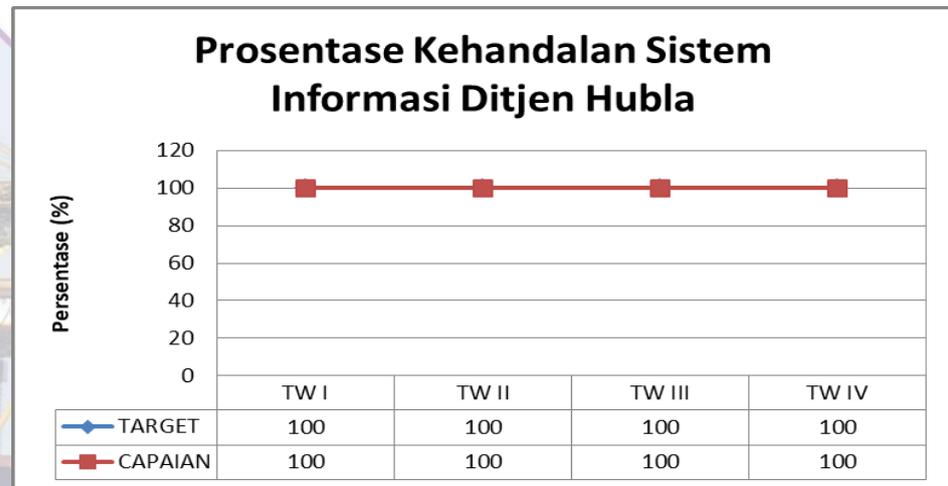
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.2 Prosentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Hubla	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 100% pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100% (sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam). Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dilaksanakan kegiatan integrasi layanan perijinan Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA), pengembangan portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Elektronik (SIRANI).

Grafik III.3.2

Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5)

Tabel II.3.6

Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5)

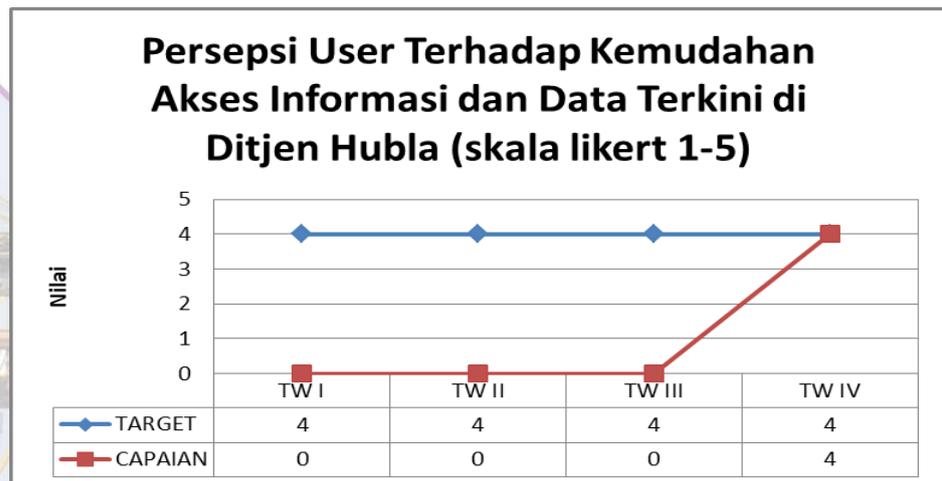
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.3 Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Ditjen Hubla (skala likert 1-5)	Nilai	4	0	0	0	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 4 (empat) Nilai dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi (0). Akan dilakukan survey kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Portal hubla.dephub.go.id dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 4 (empat) sehingga prosentasi capaian kinerja mencapai 100%

Grafik III.3.3

**Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)**



Persentase Persepsi user terhadap Kemudahan Akses Informasi sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melakukan survey yang ditayangkan melalui Pop up di portal Perhubungan Laut terhadap kurang lebih 205 (dua ratus lima) pengunjung pada kurun waktu tertentu, dengan skala likert yang menanyakan apakah sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan laut sudah handal? (sangat handal, handal, cukup handal, tidak handal, sangat tidak handal) dengan tabel poin sebagai berikut :

Tabel. III.3.7

Tabel Skala Likert

Skala Likert	Poin
Sangat puas	5
Puas	4
Cukup puas	3
Tidak puas	2
Sangat tidak puas	1

Hasil jawaban dari 205 (dua ratus lima) responden sebagai berikut:

- a) 37 responden menjawab sangat puas;
- b) 136 responden menjawab puas;
- c) 28 responden menjawab cukup puas;
- d) 4 responden menjawab tidak puas;
- e) 0 responden menjawab sangat tidak puas.

Dari data yang didapat di atas kemudian diolah dengan dengan cara mengalikan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan tabel bobot nilai, maka hasil penghitungan jawaban responden sebagai berikut:

a) Responden yang menjawab sangat puas (5) = $37 \times 5 = 185$

b) Responden yang menjawab puas (4) = $136 \times 4 = 544$

c) Responden yang menjawab cukup puas (3) = $28 \times 3 = 84$

d) Responden yang menjawab tidak puas (2) = $4 \times 2 = 8$

Responden yang menjawab sangat tidak puas (1) = $0 \times 0 = 0$

Total skor = $185 + 544 + 84 + 8 + 0 = 821$

Dari total skor 821 dibagi 205 responden sehingga mendapatkan rata rata nilai 4 yang berarti puas.

4) Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel III.3.8

Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

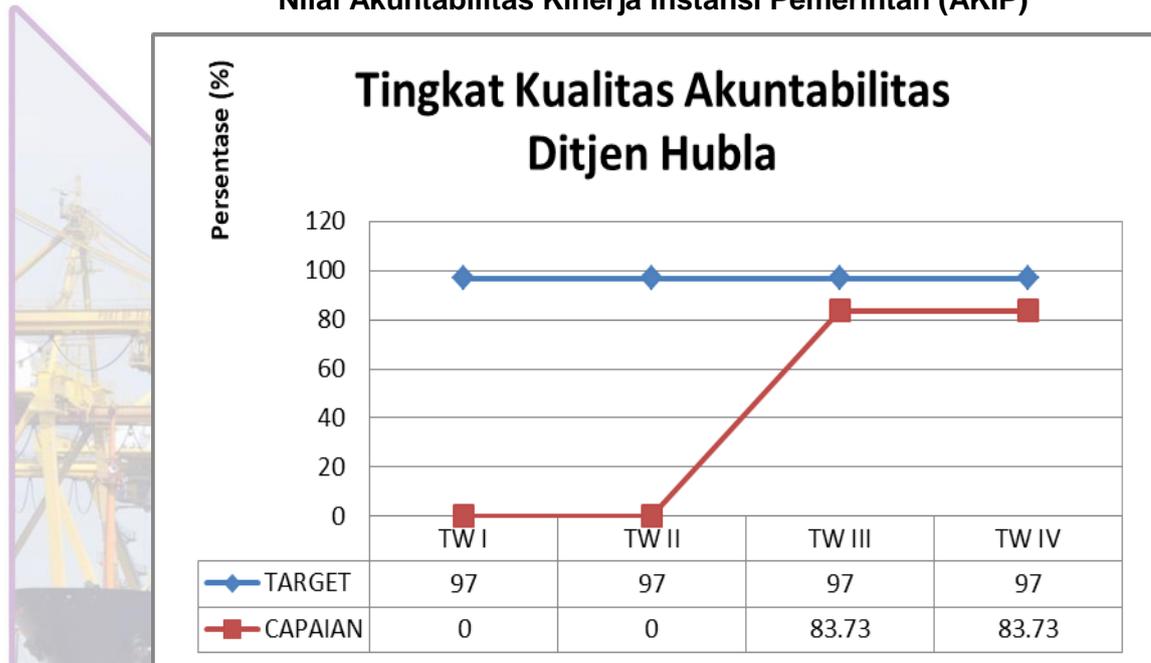
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.4 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	%	97	0	0	83,73	83,73	83,73	86,32

Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 97% terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II belum terdapat prosentase pencapaian sedangkan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 83,73% sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 86,32%.

Grafik III.3.4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



5 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla

Tabel III.3.8

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla

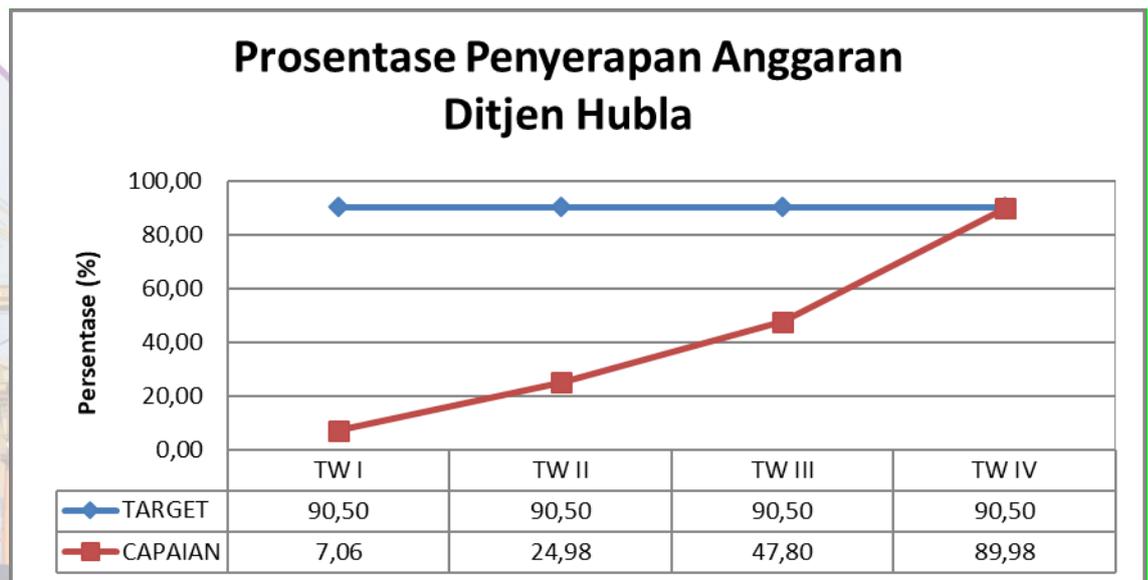
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.5 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla	%	90,50	7.06	24.98	47.80	89.98	89.98	99.43

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 90.50% dan terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 7.06%. Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 24,98% pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 47.80% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi 89.98% sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.43%.

Grafik III.3.5

Prosentase Penyerapan Anggaran

**SASARAN STRATEGIS (2)**

Sasaran strategis **Terlaksananya Perencanaan, Pemograman, Penganggaran, Monev dan Pentarifan Di Ditjen Hubla** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 6) Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya.

Tabel III.3.9

Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya

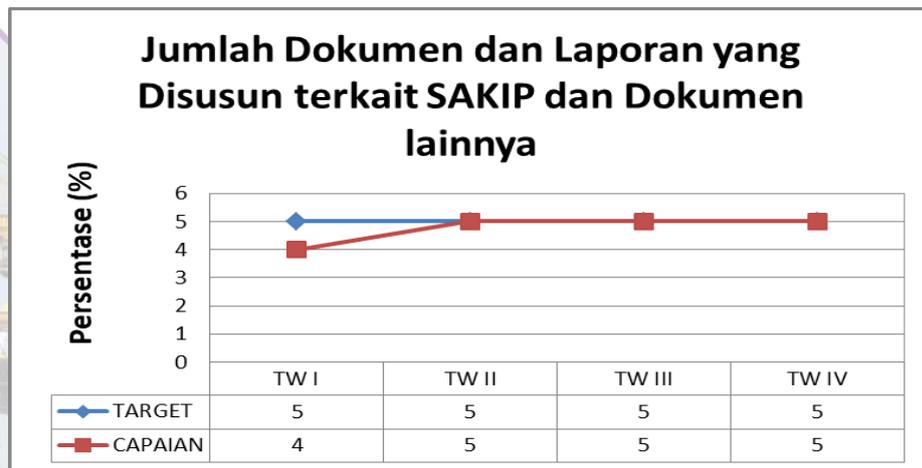
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.6 Jumlah Dokumen Dan Laporan Yang Disusun Terkait SAKIP Dan Dokumen Lainnya	Dokumen	5	4	5	5	5	5	100

Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 5 (Lima) Dokumen terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 4 Dokumen dan Triwulan II sampai Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 5 sehingga prosentase realisasinya sebesar 100%.

Grafik III.3.6

Jumlah Dokumen SAKIP dan dokumen lainnya



Adapun Dokumen SAKIP yang telah disusun yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019;
4. Rencana Aksi (Renaksi) Atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

7) Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya

Tabel III.3.10

Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya

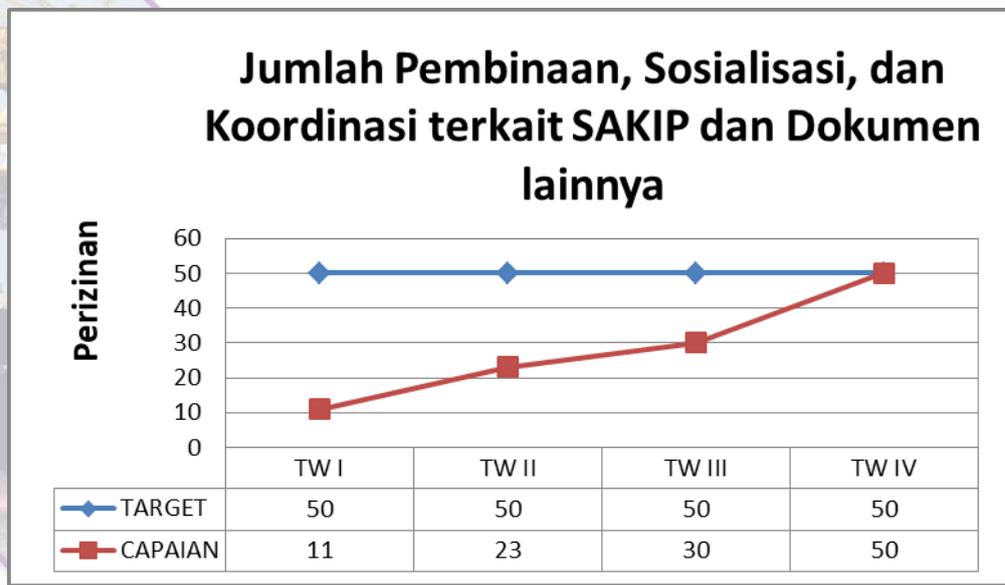
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.7 Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, Dan Koordinasi Terkait SAKIP Dan Dokumen Lainnya	Kegiatan	50	11	23	30	50	50	100

Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 50 (Lima puluh) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 11 kegiatan, Pada Triwulan II terdapat 23 Kegiatan, pada Triwulan III sebesar 30 kegiatan sedangkan pada Triwulan IV sebesar 50 kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.3.7

Prosentase Penyerapan Anggaran



8) Jumlah Studi dan Kajian Yang Disusun

Tabel III.3.11

Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun

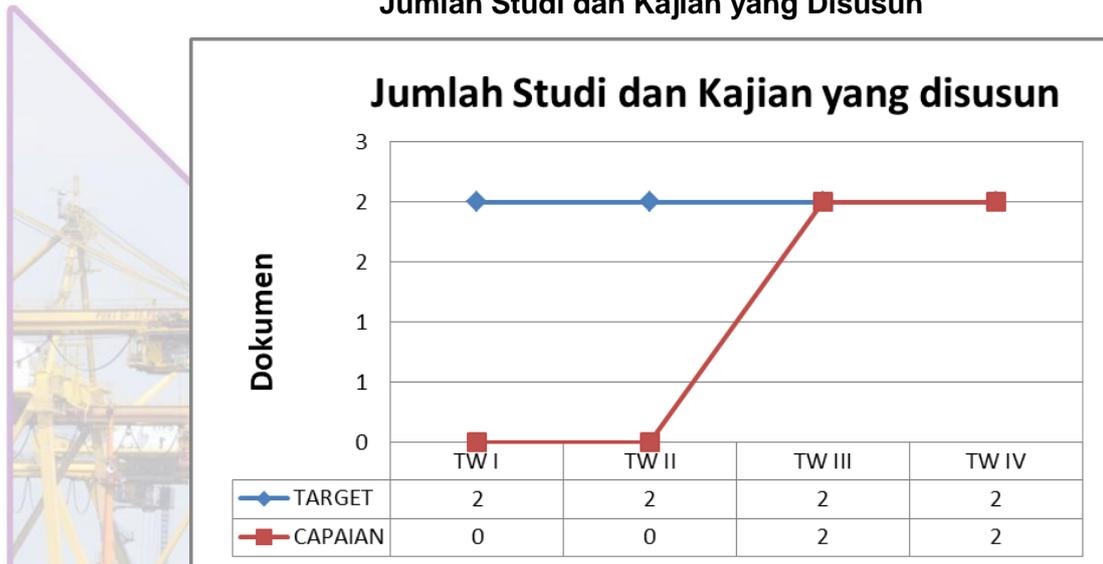
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.8 Jumlah Studi Dan Kajian Yang Disusun	Dokumen	2	0	0	2	2	2	100

Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 2 (Dua) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II belum terdapat realisasi, sedangkan Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 2 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.3.8

Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun

**SASARAN STRATEGIS (3)**

Sasaran strategis **Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara Ditjen Hubla Yang Akuntabel** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut :

9) Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun

Tabel III.3.12

Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.9 Jumlah Dokumen Dan Laporan Keuangan Di Lingkungan Ditjen Hubla Yang Disusun	Dokumen	302	302	302	302	302	302	100

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 302 (Tiga Ratus Dua) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 302 Dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%. Dimana untuk dokumen tersebut adalah :

- Rekon SAI di Bulan Januari dan Juli Tahun 2019;
- Pemuktahiran Data PNBPN di Bulan Januari dan Juli Tahun 2019;
- Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran di Bulan April Tahun 2019.

Grafik III.3.9

**Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan
di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun**



10) Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan

Tabel III.3.13

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan

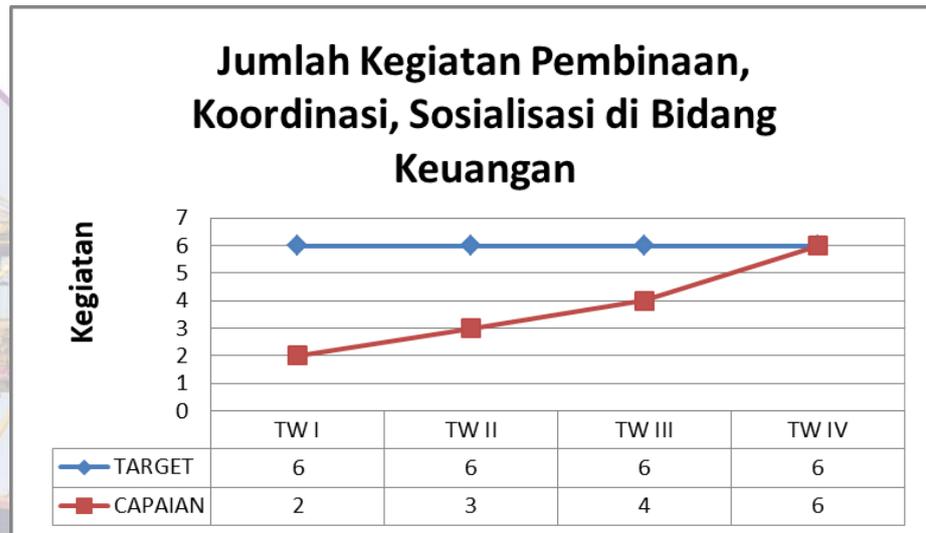
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.10 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi Di Bidang Keuangan	Kegiatan	6	2	3	4	6	6	100

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebanyak 6 (enam) Kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan Triwulan II terdapat realisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 4 (empat) kegiatan dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 6 (enam) kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik II.3.10

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan



Adapun 6 kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi Di Bidang Keuangan sebagai berikut :

1. Pembinaan PNBPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sosialisasi terkait Peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomer HK 103/4/16/DJPL-18 Tentang Tata Cara Penerimaan. Penyetoran, Penggunaan dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kegiatan Koordinasi di lakukan terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla;
4. Kegiatan Koordinasi di lakukan terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kegiatan Koordinasi di lakukan terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan;
6. Sosialisasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan.

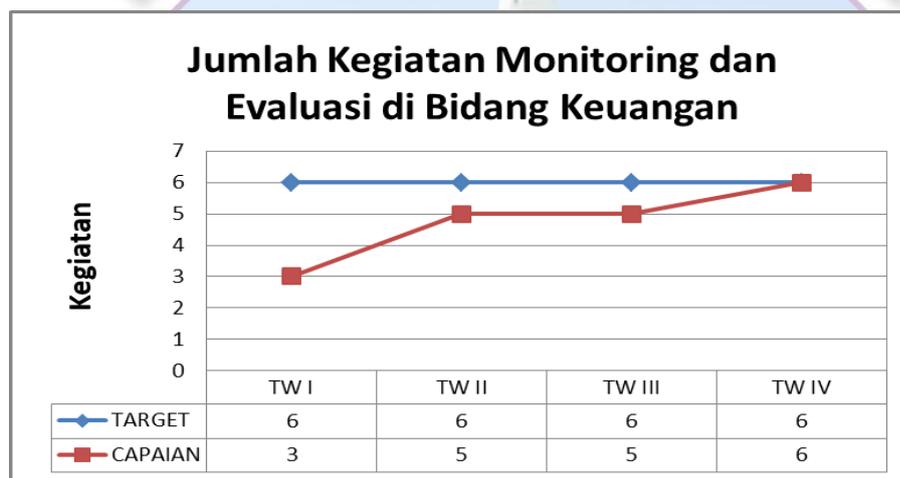
Tabel II.3.14
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.11 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Di Bidang Keuangan	Kegiatan	6	3	5	5	6	6	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 6 (enam) kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 3 (tiga) kegiatan, Triwulan II dan Triwulan III terdapat 5 (lima) Kegiatan dan Triwulan IV terdapat 6 (enam) kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.3.11
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan



Adapun jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan sebagai berikut:

1. Evaluasi dalam rangka pemuktahiran data PNBPN semester II Ta. 2018;
2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2019;
4. Evaluasi dalam rangka pemuktahiran data PNBPN semester I TA. 2019:

5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Semester I di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA.2019;
6. Inventarisasi data perubahan dokumen anggaran di Lingkungan direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

SASARAN STRATEGIS (4)

Sasaran strategis **Terlaksananya Fungsi Kepegawaian Ditjen Hubla** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

11) Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi

Tabel II.3.15

Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.12 Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dan Bimtek Terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	0	0	3	10	10	125

Sumber data : Bagian Kepegawaian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 8 (delapan) kegiatan. Terlihat pada Triwulan I sampai Triwulan II belum terdapat Realisasi, pada Triwulan III terdapat 3 Kegiatan dan Pada Triwulan IV terdapat Realisasi sebesar 10 Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 125%.

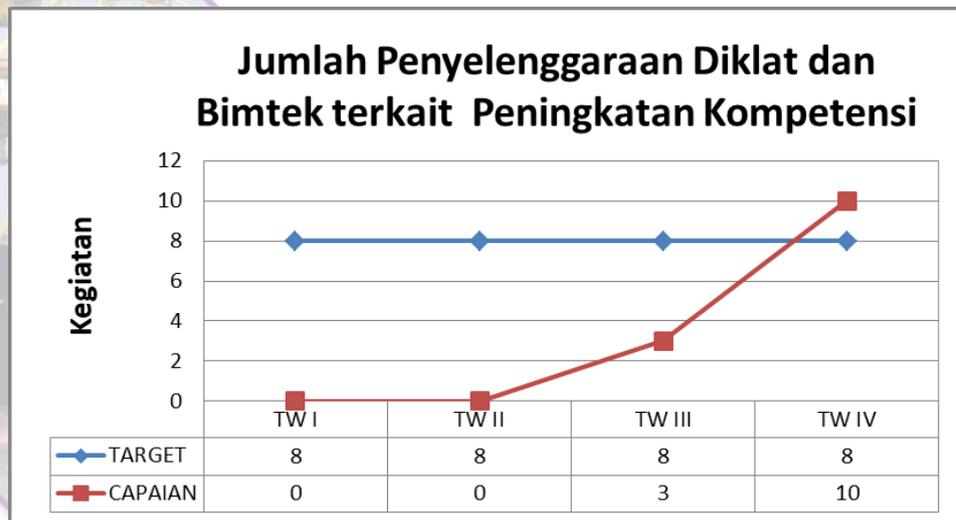
Adapun Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengelolaan Database Kepegawaian berbasis web , Supervisi sub admin database kepegawaian serta validasi pengelola kepegawaian;
2. Keahlian dan Keterampilan Pelaut terkait *Basic Safety Driving*;
3. Pelatihan *Management Leadership*;
4. Pemutakhiran Kompetensi Keahlian Laut;
5. Penyegaran *Port Management* (sudah berjalan TW I);
6. *Upgrading* Ijazah Pelaut;

7. Peningkatan Kompetensi TOT 6.09;
8. Peningkatan Kompetensi TOT 3.12;
9. Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Penyusunan Aplikasi E – LAPKIN Tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Grafik III.3.12

Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Terkait Peningkatan Kompetensi



12) Jumlah penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Tabel II.3.16

Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.13 Jumlah Penerbitan SK Mutasi/ Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional	SK	4.142	1462	4548	4998	6127	6127	147.9

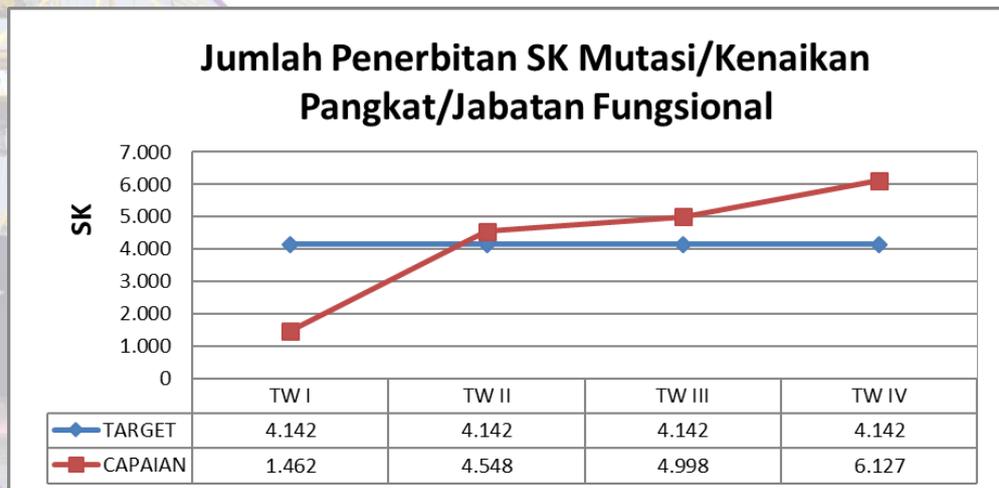
Sumber data : Bagian Kepegawaian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 4.142 (empat ribu seratus empat puluh dua) SK. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1.462 SK,

Triwulan II terdapat realisasi sebesar 4548 SK, pada Triwulan III terdapat realisasi 4998 SK sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 6.127 SK sehingga prosentase pencapaian sebesar 147.9%, adapun realisasi melebihi target yang telah ditetapkan karena meningkatnya Usulan SK Kenaikan Pangkat (KP) di Bulan April dan Oktober Tahun 2019.

Grafik III.3.13

Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional



13) Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai

Tabel III.3.17

Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai

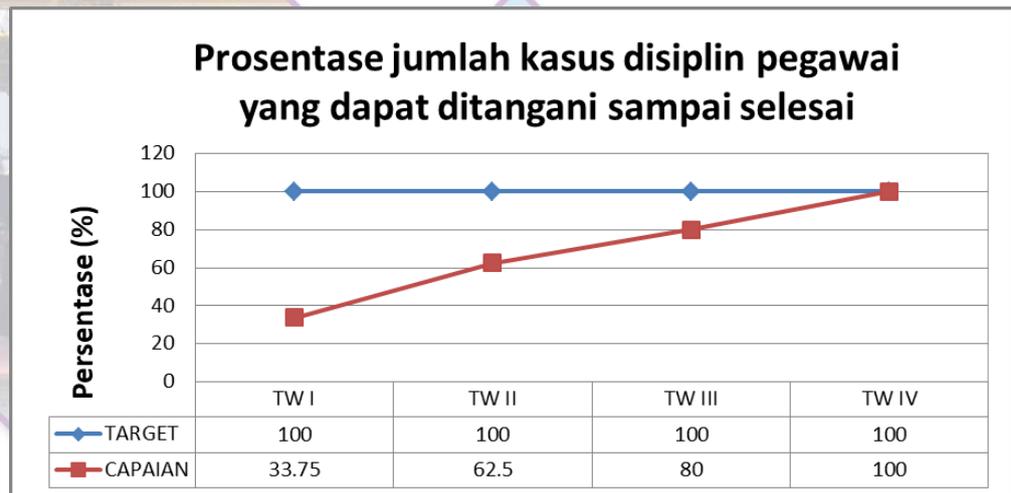
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.14 Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai Yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	%	100	33.75	62.5	80	100	100	100

Sumber data : Bagian Kepegawaian. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 100% (80 Kasus). Terlihat pada Triwulan I realisasi sebesar 33.75% (27 Kasus) dari , Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 62.50% (50 Kasus) dan Pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 80% (64 Kasus) sedangkan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100% sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dari 80 Kasus.

Grafik III.3.14

Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai



Tabel III.3.18

Daftar Kategori Kasus Disiplin Pegawai Tahun 2019

No.	Kategori Kasus	Jumlah Kasus
1	Kasus Tipikor	13 Kasus
2	Kasus Narkoba	8 Kasus
3	Kasus Perceraian	19 Kasus
4	Kasus Tidak Masuk Kerja	30 Kasus
5	Kasus Pernikahan Kedua Tanpa Izin	3 Kasus
6	Kasus Tidak Cermat Dalam Melaksanakan Tugas	1 Kasus
7	Kasus Perzinahan	1 Kasus
8	Kasus Mengundurkan Diri Tanpa Hak Pensiun	5 Kasus
Total Kasus		80 Kasus

SASARAN STRATEGIS (5)

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

14) Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan**Tabel III.3.19****Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.15	Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan Yang Ditetapkan	Dokumen	10	2	3	9	9	9	90

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 10 (sepuluh) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 2 Dokumen, Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3 Dokumen sedangkan Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 9 Dokumen sehingga prosentase pencapaian sebesar 90% dikarenakan masih dalam proses penyusunan peraturan. Adapun rancangan yang sudah ditetapkan antara lain adalah :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/2/10/DJPL/2019 tentang Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukkan Ahli di Bidang Pelayaran;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Penanganan Tindak Pidana Pelayaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Statutory Kapal pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;

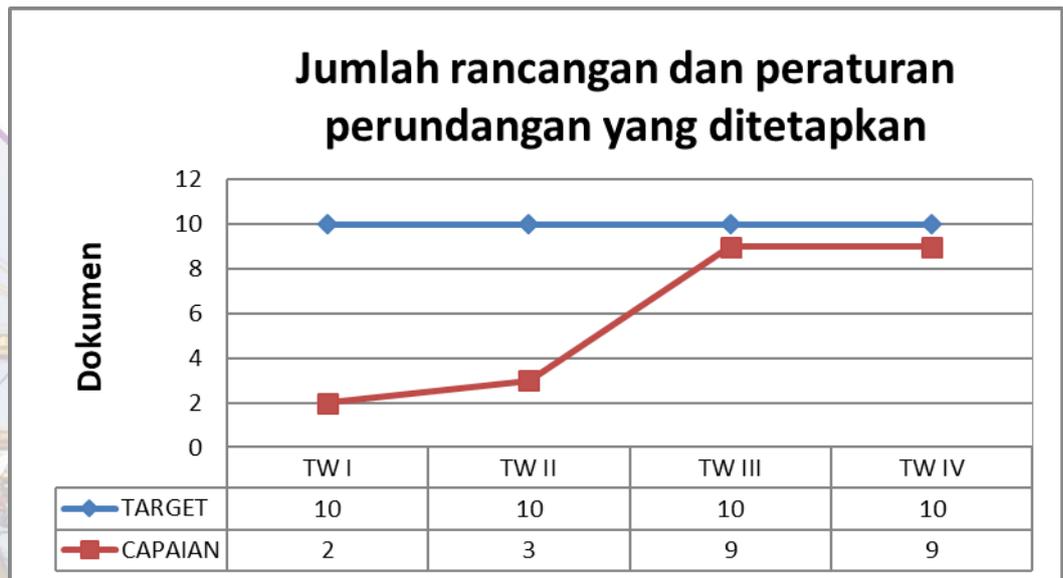
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 211/6/14/DJPL/2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 15 Tahun 2019 tentang Prioritas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Bulan Puasa dan Lebaran 2019;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 431/DJPL/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/8/5/DJPL/2019 tentang Pemberlakuan Standar Operasioal Prosedur Pengujian Peralatan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) Klas B;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/8/13/DJPL/2019 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penempatan Kapal Negara Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/8/14/DJPL/2019 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keselamatan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Adapun terdapat beberapa rancangan peraturan yang belum ditetapkan adalah :

1. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia;
2. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyelenggaraan Fungsi Intelijen di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim di Area Labuh Perairan Indonesia.

Grafik III.3.15

Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan yang Ditetapkan



16) Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan

Tabel III.3.20

Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.16 Jumlah Peraturan Perundangan Yang Telah Di Sosialisasikan	Dokumen	8	0	2	5	5	5	62,5%

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 8 (delapan) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi, Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar 2 Dokumen, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 5 dokumen dan Triwulan IV terdapat Realisasi sebesar 5 Dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 62,5%.

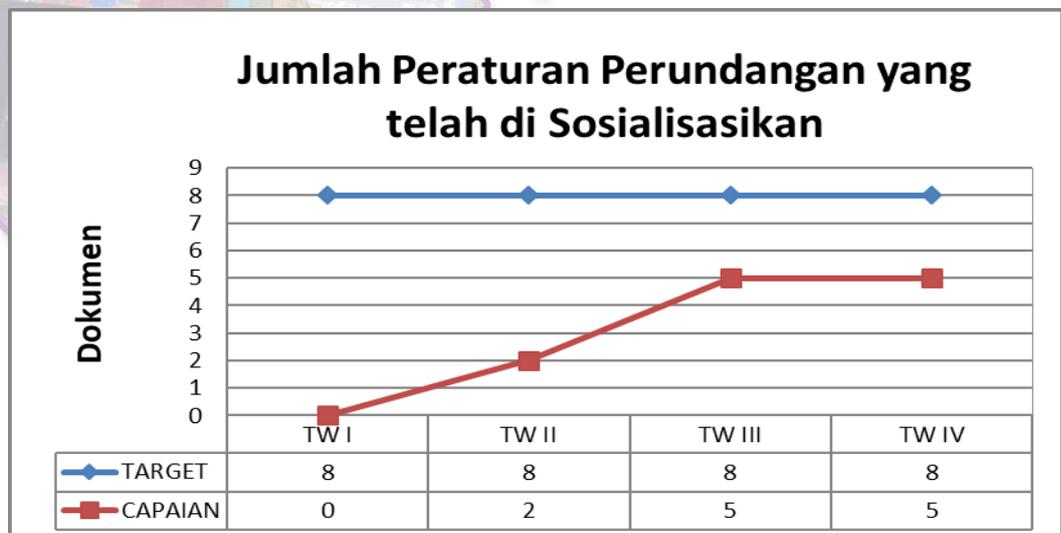
Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia

Grafik III.3.16

Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan



17) Jumlah Penyelesaian Perkara

Tabel III.3.21

Jumlah Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.17 Jumlah Penyelesaian Perkara	Dokumen	5	0	0	0	2	2	40

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen. Perhubungan Laut.

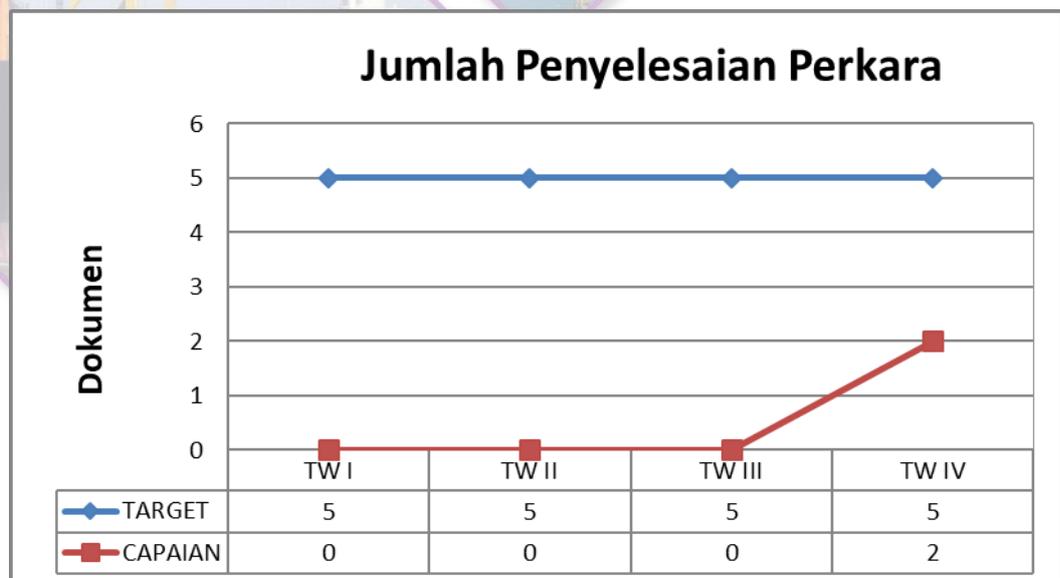
Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 5 (lima) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan III belum terdapat realisasi sedangkan Pada Triwulan IV terdapat Realisasi sebesar 2 Dokumen, sehingga prosentase 40%.

Beberapa perkara yang telah diselesaikan antara lain :

1. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2019/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. Gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.Sus-Lain-Lain/2019/PN Niaga Mdn Jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Lain-Lain/2018/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

Grafik III.3.17

Jumlah Penyelesaian Perkara



SASARAN STRATEGIS (6)

Sasaran strategis **Meningkatnya Pemenuhan Dan Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Di Bidang Transportasi Laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

18) Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri

Tabel III.3.22

Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.18 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	6	3	3	6	9	9	150

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 6 (enam) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3 Dokumen sedangkan Triwulan III sebesar 6 Dokumen dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 9 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 150%.

Grafik III.3.18

Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri



Adapun Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri sebagai berikut:

1. Kesepahaman bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Permenhub Kota Batang tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Bidang Pelayaran;
2. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pengawasan Lalu Lintas Barang dan/atau Sarana Pengangkut Laut Serta Pertukaran Data Terkait Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal;

3. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Penangkap Ikan dan Kepelautan;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia tentang Dukungan Pengawasan dan Pengamanan di Bidang Pelayaran;
6. Kesepakatan Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut;
7. Kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Institut Teknologi Sepuluh November tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Sektor Perhubungan Serta Pengembangan Kapal Pelayaran Rakyat;
8. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem tentang Pemanfaatan Pelabuhan Tanah Ampo;
9. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentang Optimalisasi Fungsi Pengoperasian Kapal Rede dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak di Provinsi Jawa Timur.

19) Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral

Tabel III.3.23

Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral

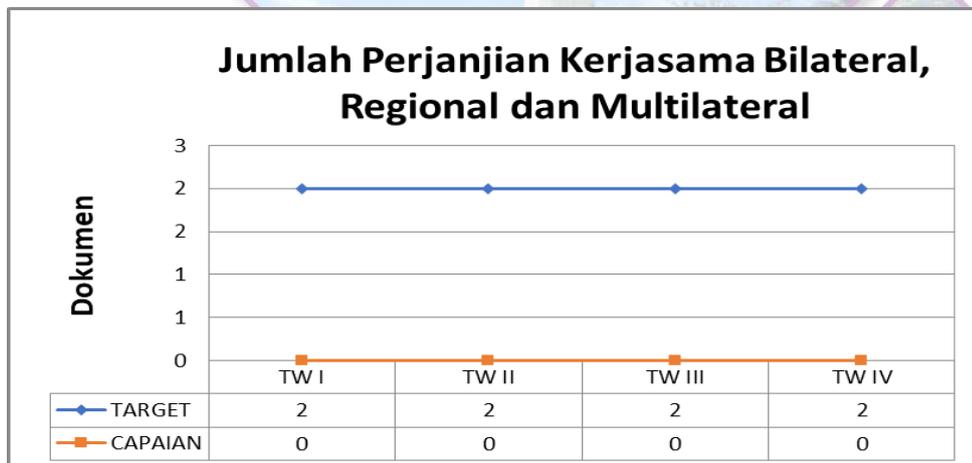
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.19 Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 2 (dua) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV belum terdapat realisasi sehingga prosentase pencapaian sebesar 0%. Bahwa tidak terealisasinya kegiatan Perjanjian Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral adalah belum adanya usulan hal-hal yang akan dikerja samakan baik itu dari Indonesia maupun negara-negara lain

Grafik III.3.19

Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral



20) Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional

Tabel III.3.24
Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional Dan Internasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.20 Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional Dan Internasional	Dokumen	18	1	1	5	14	14	77.78

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 18 (delapan belas) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat 1 Dokumen, sedangkan Triwulan III terdapat Realisasi sebesar 5 Dokumen dan Triwulan IV terdapat realiasi sebesar 14 Dokumen sehingga prosentase pencapaian sebesar 77.78%.

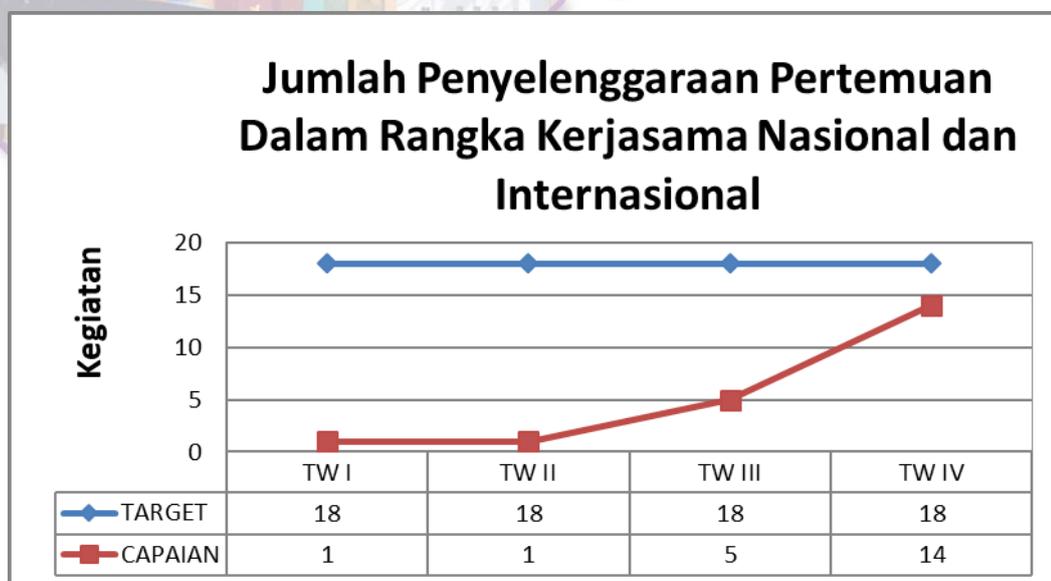
Beberapa penyelenggaraan pertemuan yang dilakukan antara lain adalah :

1. *1st Marine Pollution Committee Indonesia – Australia* 27 Maret 2019
2. *Train-Implement Course on Legal, Policy and Internal Reform (LPIR)* tanggal 29 Juli s.d 1 Agustus 2019 di STIP Jakarta;
3. *Workshop on International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code* tanggal 27 s.d 29 Agustus di Jakarta;
4. *Training on Port State Control (PSC) Inspection* tanggal 18 s.d 20 September 2019 di Jakarta;
5. *Workshop ITCP Maritime Security* pada tanggal 15-18 Oktober 2019 di Bali Indonesia;
6. *National Workshop on Glo-Fouling Project* 28 s.d 29 Oktober 2019 di Jakarta
7. *12th Cooperation Forum* tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2019 di Semarang;
8. *44th Tripartite Technical Expert Group* tanggal 2 s.d 3 Oktober di Semarang;
9. *12 Project Coordination Committee* tanggal 4 Oktober di Semarang;
10. *Workshop on Maritime Labour Convention 2006 Implementation* tanggal 9 s.d 11 Oktober 2019;

11. *Vessel Traffic Service (VTS) Operator Course* tanggal 21 Oktober s.d 1 November 2019 di Batam;
12. *Workshop on the Implementation of the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)* tanggal 5 s.d 6 November 2019
13. *Course on Non-Convention Vessel Standards (NCVS)* tanggal 12 s.d 14 November 2019;
14. *Workshop on IMO Casulaty Investigation Code : Marine Safety Investigation* tanggal 13 s.d 15 November 2019.

Grafik III.3.20

Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional



SASARAN STRATEGIS (7)

Sasaran strategis **Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

21) Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran

Tabel III.3.25

Persentase Penatausahaan Adinistrasi Perkantoran

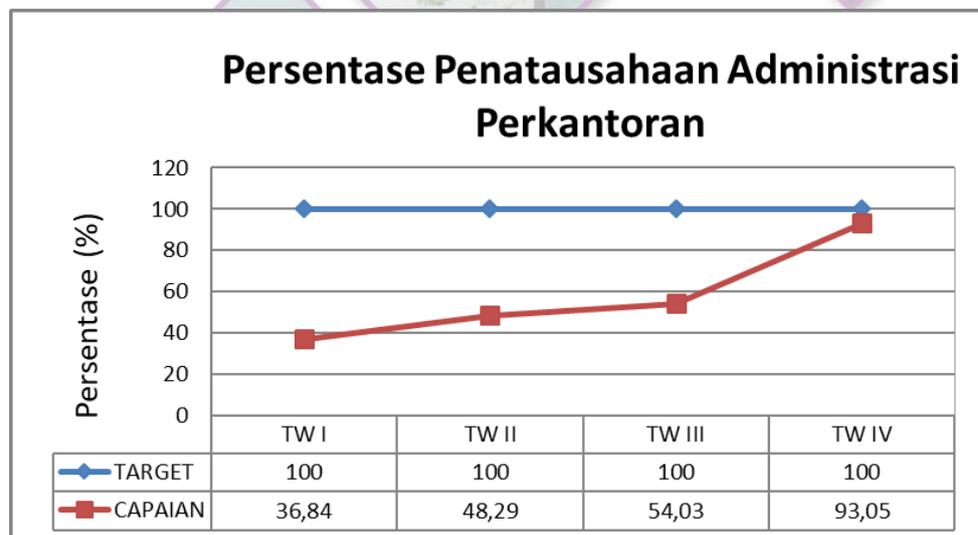
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.21 Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	%	100	36.84	48.29	54.03	93.05	92,60	93.05

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 100 % pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 36.84%, pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 48.29%, sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 54.03% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 93.05%. Adapun prosentase pencapaian sebesar 93,05% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan karena pengadaan pengolah data dilaksanakan pada akhir tahun dan harga barang disesuaikan dengan *e-katalog* dan ada beberapa pengadaan cetakan karena nilai anggarannya kecil sehingga dimasukkan kedalam anggaran cetak sekretariat dan cetakan lainnya.

Grafik III.3.21

Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran



22) Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan

Tabel III.3.26

Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan

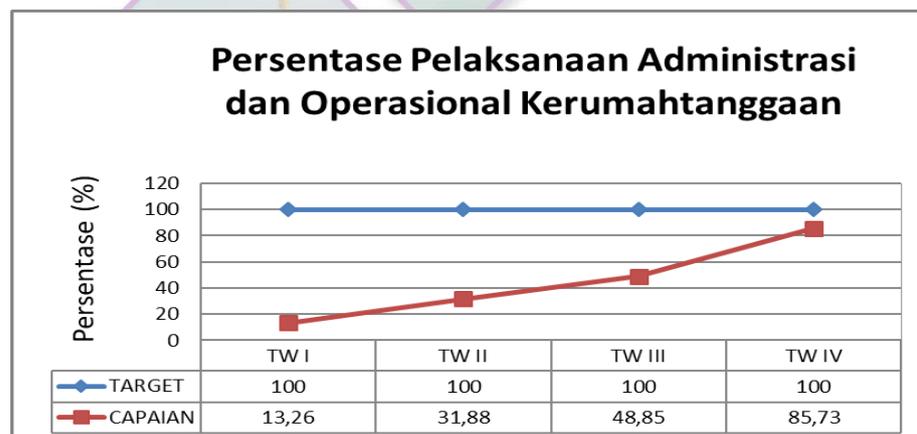
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.22 Persentase Pelaksanaan Administrasi Dan Operasional Kerumahtanggaan	%	100	13,24	31,88	48,85	85,73	85,73	85,73

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 100 %, terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 13,24%, pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 31,88%, sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 48,85% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 85,73% adapun prosentase pencapaian sebesar 85,73% sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya sisa anggaran pekerjaan pemeliharaan Gedung kantor, pemeliharaan alat-alat yang menunjang perkantoran, pajak kendaraan yang tidak terealisasi dikarenakan biaya administrasi pihak ketiga (biro jasa) lebih besar dari biaya pajak stnknya dan rotasi pelantikan serta sertijab pada tahun 2019 sedikit pelaksanaan dalam mutasi pejabat structural di Lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Grafik III.3.22

Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan



23) Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut

Tabel III.3.27

Nilai BMN pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut

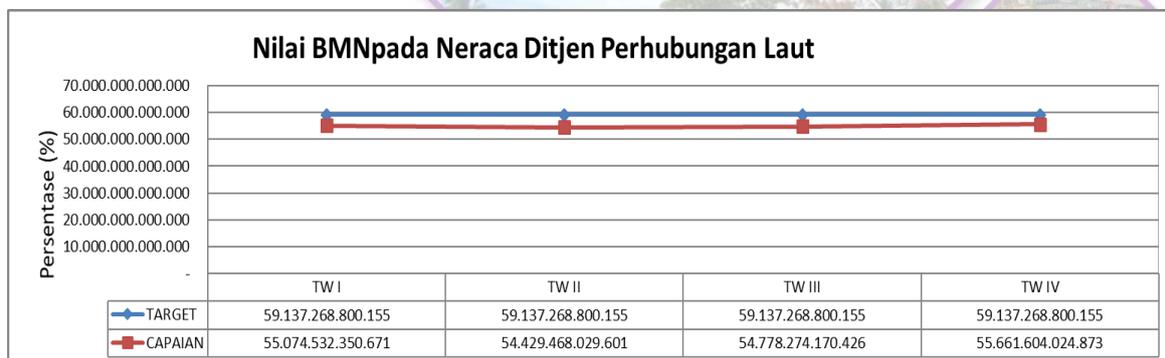
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.23	Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp. 59,137,268,800,155.00	55,074,532,350,671	54,429,468,029,601	54,778,274,170,426	55.661.604.024.873	55.661.604.024.873	94,12

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 59,137,268,800,155.00 terlihat pada Triwulan I terdapat Realisasi sebesar 55,074,532,350,671, Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar Rp. 54,429,468,029,601 terlihat realisasi, Pada Triwulan III terdapat Realisasi sebesar Rp. 54,778,274,170,426, Pada triwulan IV terdapat Realisasi sebesar Rp. 55.661.604.024.873 sehingga prosentase pencapaian sebesar 94,12%. (Data belum FIX dan Masih menunggu hasil audited)

Grafik III.3.23

Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut



SASARAN STRATEGIS (8)

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Kehumasan Ditjen Hubla** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

24) Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat

Tabel III.3.28

Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.24 Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	Kegiatan	5	2	5	5	5	5	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

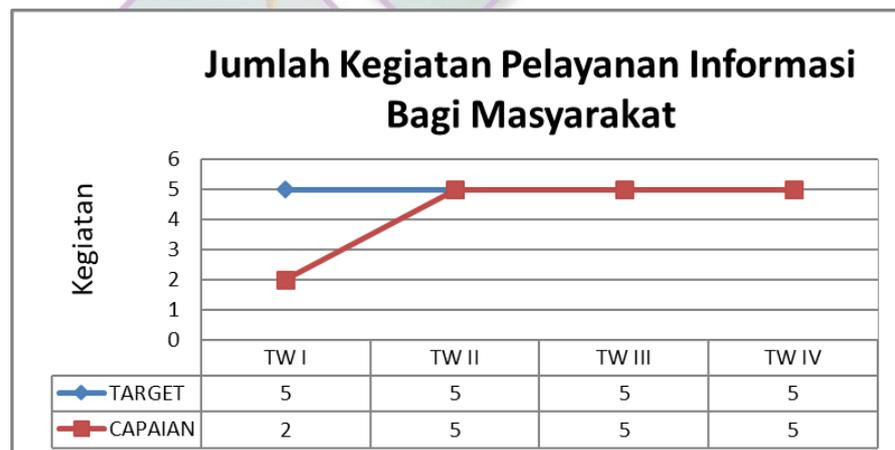
Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 5 (lima) kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 2 Kegiatan dan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV terdapat 5 Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% .

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. *News Letter* (perbulan);
2. *Advertorial* (artikel di media)
3. Iklan Layanan Masyarakat;
4. Talksow / Dialog Interaktif di Televisi;
5. Publikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Media Cetak.

Grafik III.3.24

Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat



25) Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler

Tabel II.3.28

Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.25 Jumlah Kegiatan Kehumasan Dan Protokoler	Kegiatan	14	6	6	12	16	16	114.29

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 14 (empat belas) Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 6 (enam) Kegiatan, sedangkan Triwulan III terdapat Realisasi sebesar 12 Kegiatan dan Pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 16 sehingga prosentase pencapaian sebesar 114.29%.

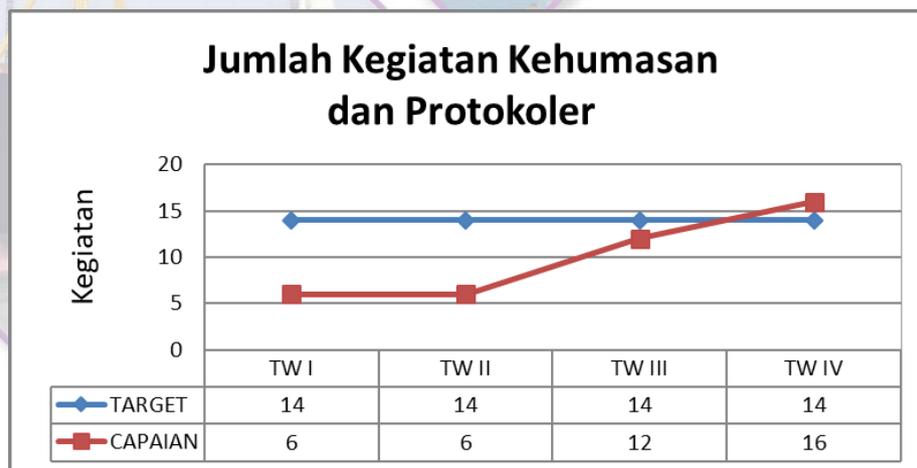
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Evaluasi Ringkasan dan Alalisa Berita (perbulan);
2. Dokumentasi foto dan video (perbulan);
3. Pembuatan Siaran Pers (perbulan);
4. Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut (perbulan);
5. Liputan Khusus Pembangunan SARPRAS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (perbulan);
6. Liputan Penyelenggaraan dan Publikasi Sidang Internasional di Indonesia (Sidang IMO di London);
7. Pembuatan Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Video Klip Lagu Jingle Dirjen Hubla);
8. Kampanye Keselamatan Pelayaran (tanggal 20 September Tahun 2019 di Labuan Bajo);
9. Bimtek Media Sosial (30-31 Juli Tahun 2019 di Malang);
10. Penyusunan Buklet, Spanduk dan Banner (Materi Publikasi untuk Pameran);

11. Penyelenggaraan Pameran / Visualisasi (Pameran Wonnderfull Sail Nias tanggal 11 – 14 September 2019 dan Pameran Indotrans Expo di JCC Tanggal 13 – 15 September 2019);
12. *Workshop* keterbukaan informasi *public*;
13. Bimtek Kehumasan;
14. *Media Realitation*;
15. *Press Tour* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Tanggal 18 – 21 September 2019 di Labuan Bajo).

Grafik III.3.25

Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler

**SASARAN STRATEGIS (9)**

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 26) **Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi**

Tabel III.3.30

Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.26 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Kegiatan	2	1	3	3	3	3	150

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut.

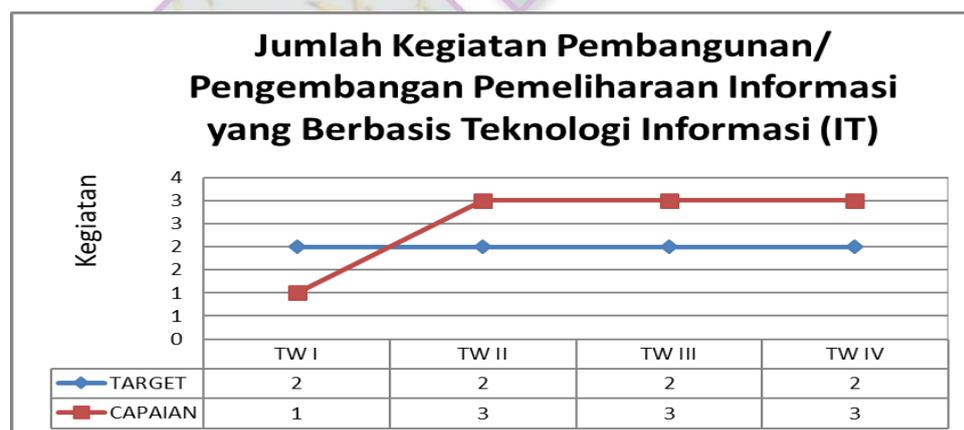
Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 2 (dua) kegiatan Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 kegiatan, dan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 3 (tiga) Kegiatan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 150%.

Adapun kegiatan yang dimaksud adalah :

- Portal *Website* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIRANI);
- Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA).

Grafik III.3.26

Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi



SASARAN STRATEGIS (10)

Sasaran strategis **Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

27) Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB

Tabel III.3.31

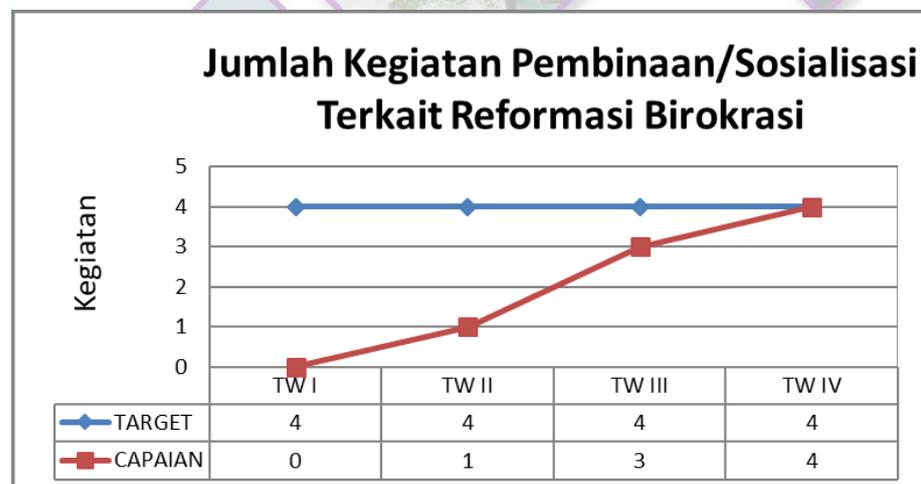
Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.27 Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB	Kegiatan	4	0	1	3	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 4 (empat) Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi Kegiatan, Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar 1 Kegiatan sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 3 Kegiatan dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 4 kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.3.27

Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB

Adapun 4 Kegiatan Pembinaan / Sosialisasi Terkait RB antara lain :

1. Bimbingan Teknis Survey Kepuasan Masyarakat (Bandung, Yogyakarta dan Surabaya);
2. Sosialisasi Penyusunan Dokumen Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

28) Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi yang Disusun

Tabel II.3.31

Jumlah Dokumen RB yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.28	Jumlah Dokumen RB Yang Disusun	Kegiatan	2	0	0	0	2	2	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

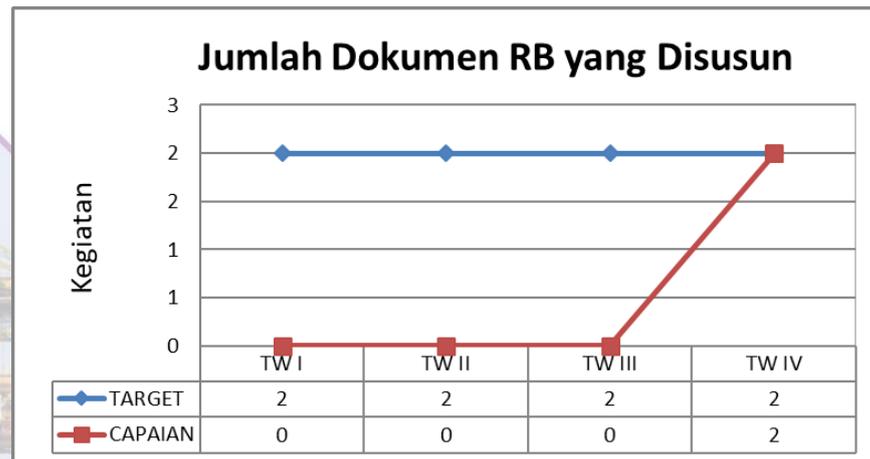
Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 2 (dua) Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi dan Papada Trwialan IV terdapat realisasi sebesar 2 kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Adapun 2 Dokumen RB yang disusun antara lain :

1. Dokumen Standar Operational Prosedur (SOP);
2. Dokumen Peta Proses Bisnis;

Grafik III.3.28

Jumlah Dokumen RB yang Disusun

**SASARAN STRATEGIS (11)**

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

29) Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek

Tabel II.3.32

Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.29 Jumlah SDM Setditjen Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Orang	133	0	11	92	133	133	100

Sumber data : Bagian Kepegawaian, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 30 (tiga puluh) orang dimana terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi, Triwulan II terdapat realisasi sebanyak 11 orang, Triwulan III terdapat realisasi sebanyak 92 orang dan Triwulan IV terdapat realisasi sebanyak 133 orang, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

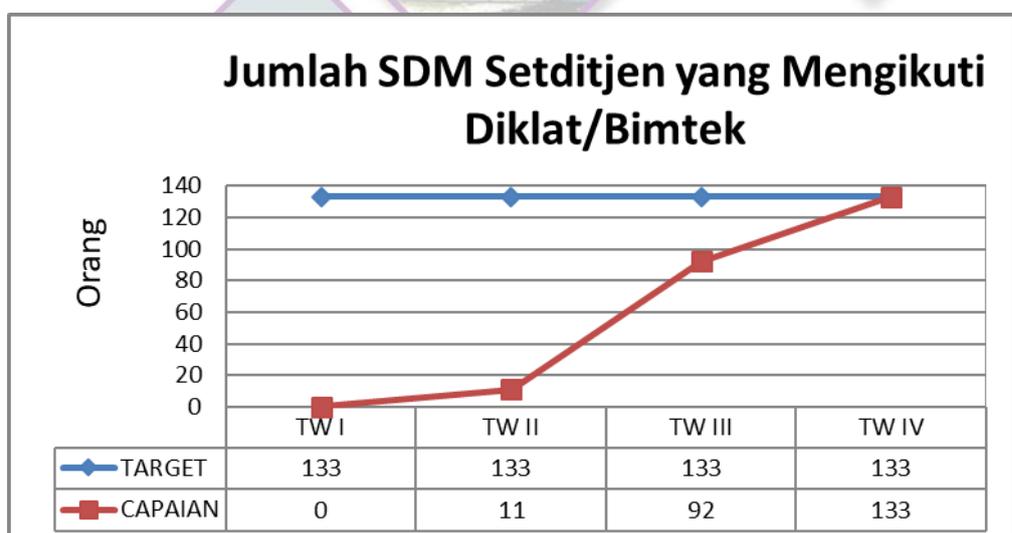
Tabel. III.3.32

Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek

NO	NAMA DIKLAT/BIMTEK	BULAN	JUMLAH SDM
Bagian Kepegawaian			
1	Pelatihan MC dan Protokol	April	1
2	Keahlian dan Keterampilan Pelaut terkait pelatihan BST	Agustus	4
3	Bimbingan Teknis LHKPN dan LHKASN	September	10
4	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kepegawaian	Agustus	5
5	Bimbingan Teknis Teknologi dan Komunikasi Perhubungan	November	10
Bagian Hukum & KSLN			
1	Bimbingan Teknis Advokasi	November	29
Bagian Perencanaan			
1	Bimbingan Teknis E-Planning	Juli	10
2	Bimbingan Teknis RKAKL (Penyusunan)	Agustus	10
3	Bimbingan Teknis E-Performance	Juli	10
4	Bimbingan Teknis SPIP	Mei	10
5	Bimbingan Teknis Monitoring dan <i>Smart</i>	Agustus	10
6	Bimbingan Teknis RENSTRA	Agustus	10
7	Bimbingan Teknis PK	Agustus	10
Bagian Keuangan			
1	Bimbingan Teknis LHKPN dan LHKASN	September	2
2	Bimbingan Teknis Advokasi	November	2
Total Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek			133

Grafik III.3.29

Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek



SASARAN STRATEGIS (12)

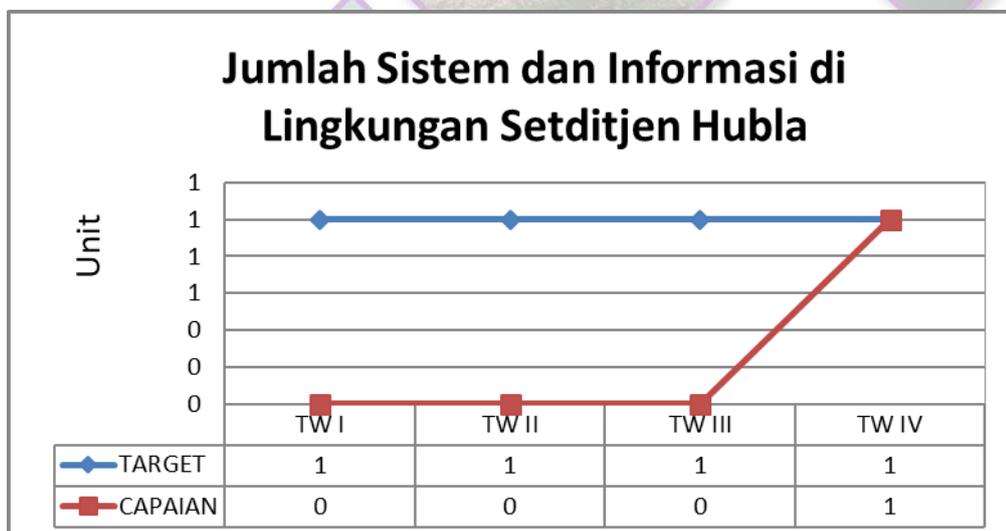
Sasaran strategis **Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses Di Setditjen Hubla** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

30) Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla**Tabel III.3.33****Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.30 Jumlah Sistem Dan Informasi Di Lingkungan Setditjen Hubla	Unit	1	0	0	0	1	1	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 1 (satu) unit Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi, dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 1 (satu) unit sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.3.30**Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla**

31) Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla

Tabel III.3.34

Jumlah Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10)

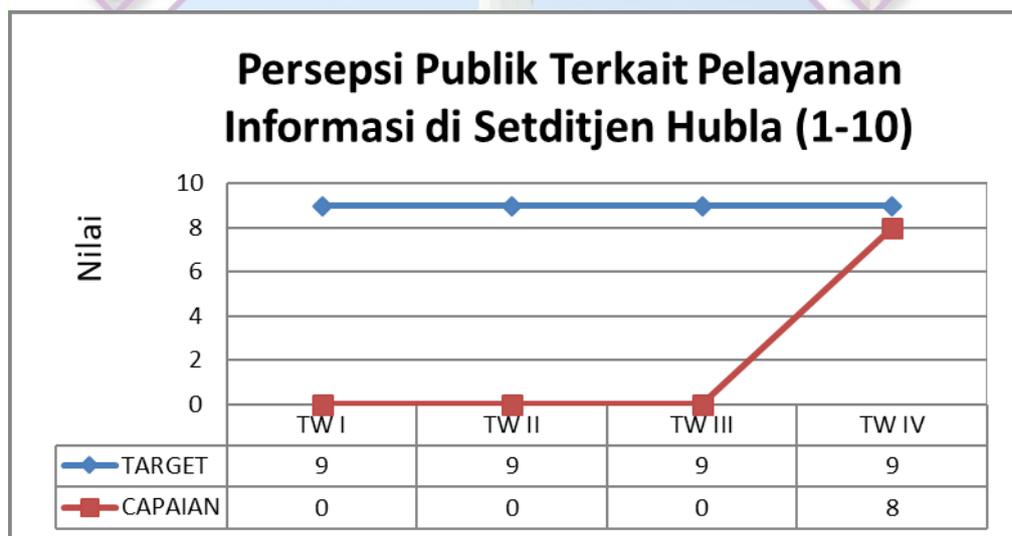
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.31 Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla (1-10)	Nilai	9	0	0	0	8	8	88.89

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 9 (sembilan) Nilai. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi dan pada triwulan IV terdapat realisasi sebesar 8 sehingga prosentase pencapaian sebesar 88.89%,

Grafik III.3.31

Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla



SASARAN STRATEGIS (13)

Sasaran strategis **Jumlah dokumen SAKIP yang disusun** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

32) Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun

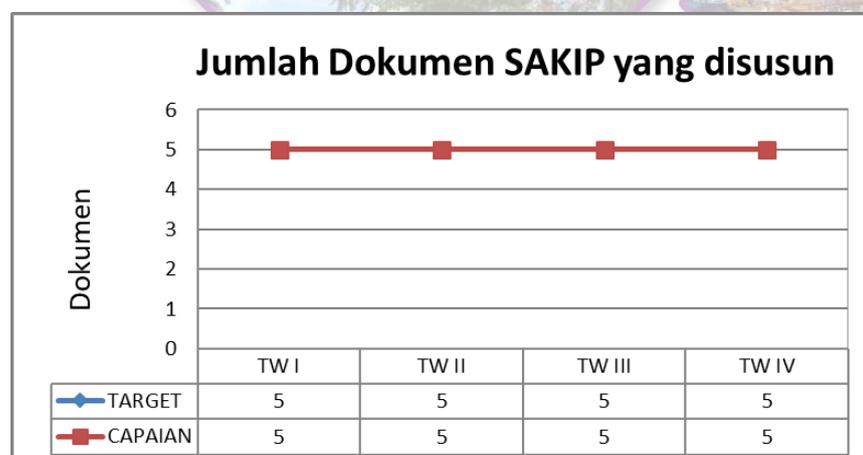
Tabel II.3.35
Jumlah dokumen SAKIP yang disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.32 Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	Dokumen	5	5	5	5	5	5	100

Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 5 (lima) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 5 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.3.32
Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun



Adapun Dokumen SAKIP yang telah disusun yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018;
4. Rencana Aksi (Renaksi) Atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

SASARAN STRATEGIS (14)

Sasaran strategis **Terkelolanya Anggaran Setditjen Hubla secara Optimal** terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

33) Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla

Tabel III.3.36

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla

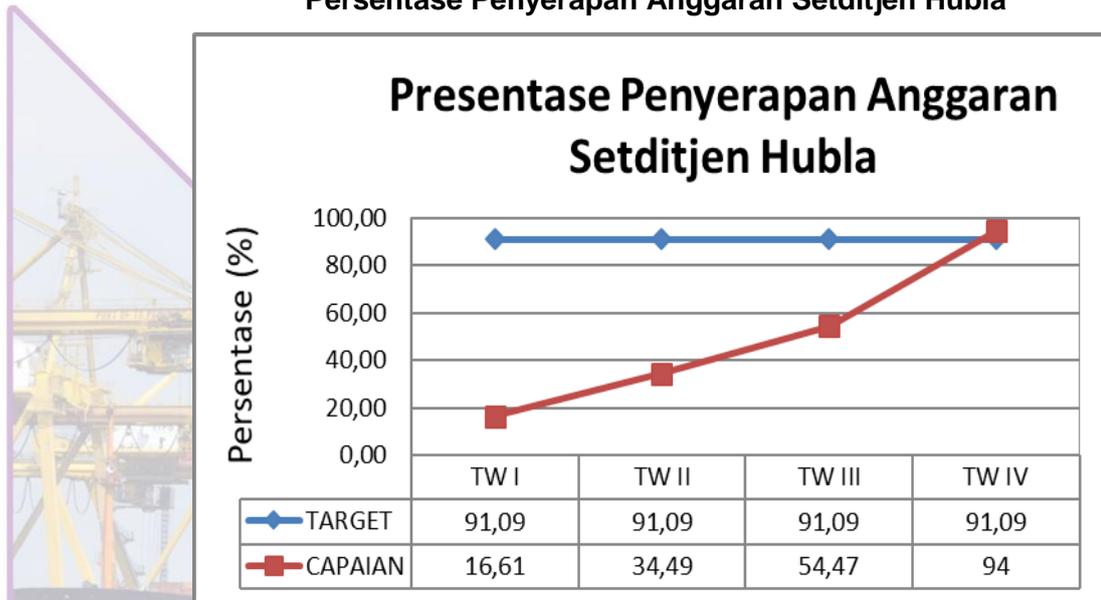
INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.33	Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla	%	91.09	16.61	34.49	54.47	94.40	94.40	103.63

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 91.09%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 16.61%, Pada Triwulan II terdapat Realisasi Sebesar 34.49% dan pada Triwulan III terdapat Realiasi sebesar 54.47% dan pada triwulan IV terdapat realisasi sebesar 94.40% sehingga prosentase pencapaian sebesar 103.63%.

Grafik III.3.33

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla



34) Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla

Tabel III.3.37

Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla

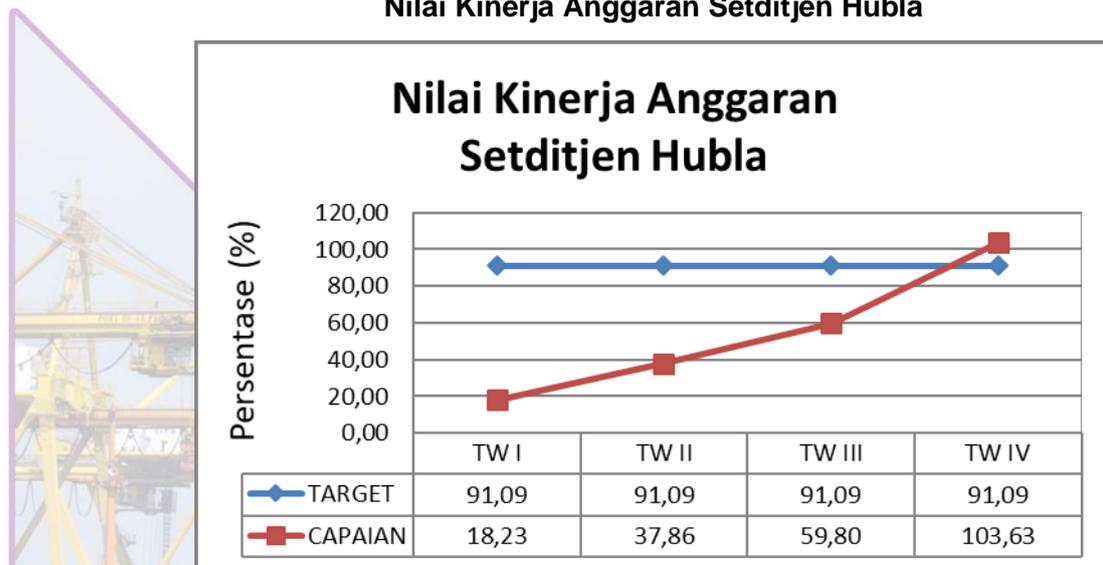
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.34 Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla	%	91,09	18,23	37,86	59,80	103,63	103,63	113,77

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 91,09%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 18,23%, Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar 37,86% sedangkan pada Triwulan III terdapat Realisasi sebesar 59,80% dan pada triwulan IV terdapat realisasi sebesar 103,63 sehingga prosentase pencapaian sebesar 113,77%.

Grafik III.3.34.

Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla



35) Nilai BMN Setditjen Hubla

Tabel III.3.38

Nilai BMN Setditjen Hubla

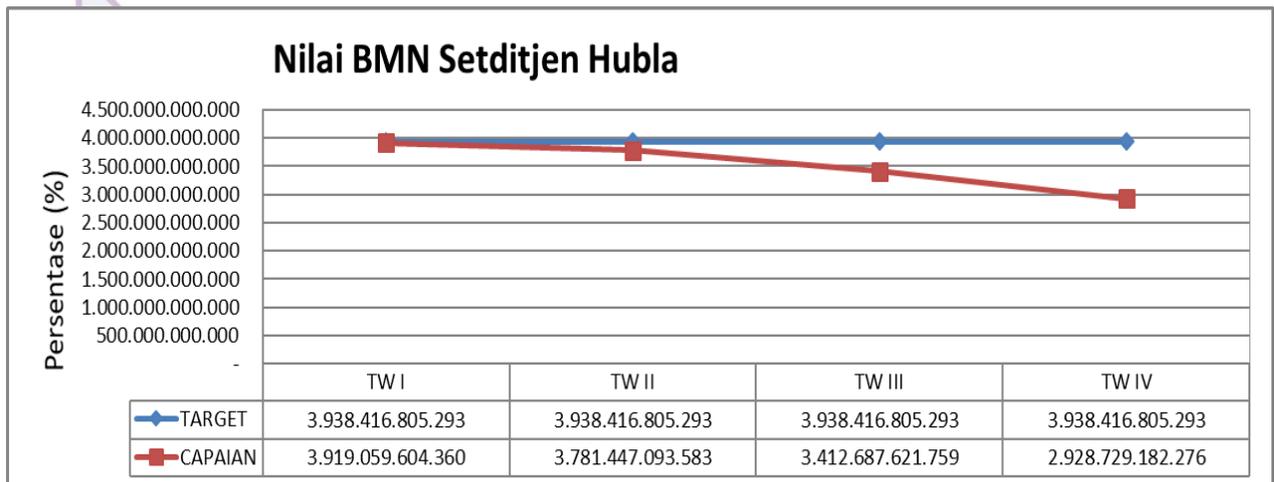
INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.35	Nilai BMN Setditjen Hubla	Rp.	3,938,416,805,293	3,919,059,604,360	3,781,447,093,583	3,412,687,621,759	2.928.729.182.276	2.928.729.182.276	74,36

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 3,938,416,805,293 Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar Rp.3,919,059,604,360, Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar Rp. 3,781,447,093,583 dan Pada Triwulan III terdapat Realisasi sebesar Rp. 3,412,687,621,759, dan pada Triwulan IV terdapat realisasi Rp. 2.928.729.182.276 sehingga prosentase pencapaian sebesar 74,36%.

Grafik III.3.35.

Nilai BMN Setditjen Hubla



36) Target PNPB Setditjen Hubla

Tabel II.3.39

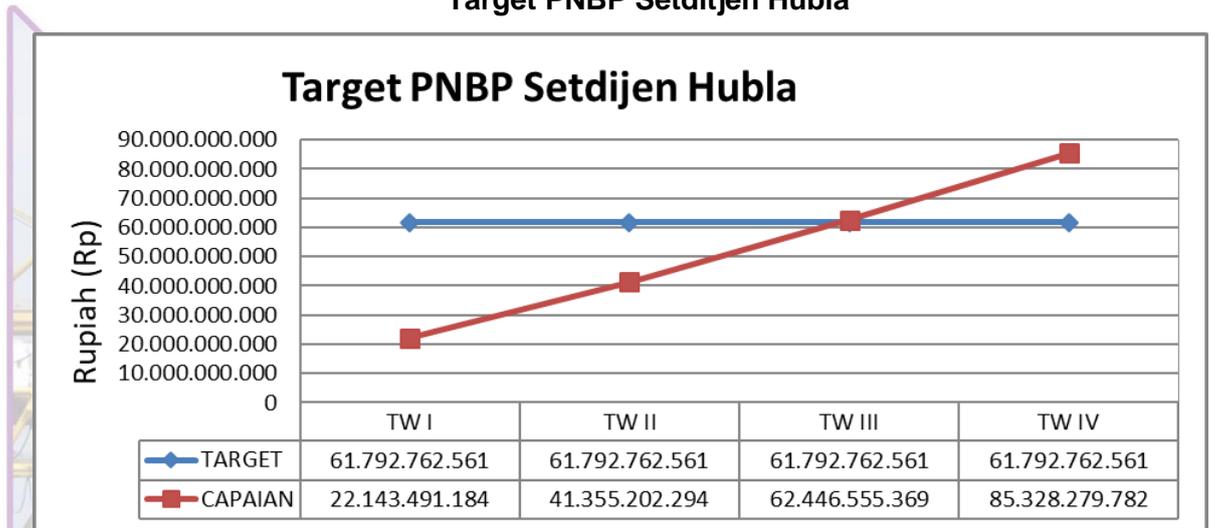
Target PNPB Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.36 Target PNPB Setditjen Hubla	Rp	61,792,762,561	22.143.491.184	41.355.202.294	62.446.555.369	85.328.279.782	85.328.279.782	138,09

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 61.792.762.561. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar Rp. 22.143.491.184, pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar Rp. 41.355.202.294 sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 62.446.555.369 dan Pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar Rp. 85.328.279.782 sehingga prosentase pencapaian sebesar 138,09%.

Grafik III.3.36
Target PNBPN Setditjen Hubla



III.4 ANALISA EFISIENSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA

TABEL III.4.1
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	KINERJA (%)	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
Terselenggaranya Administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase Peningkatan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	90	Bag. KEPEGAWAIAN	107,11	96,40	-	-	-
	IKU.2	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	Bag. BAGORMAS	100	100	Workshop Pengelolaan TIK	Rp. 618.000.000	Rp. 617.985.000
	IKU.3	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).	Nilai	4	Bag. BAGORMAS	100	4			
	IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	97	Bag. PERENCANAAN	0	0			
	IKU.5	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90,50	Bag. KEUANGAN	99,43	89,98	1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Rp. 10.405.455.584.000	Rp. 9.321.039.513.297

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	KINERJA (%)	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	
Terlaksananya Perencanaan, Pemograman, Penganggaran, Monev Dan Pentarifan Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah Dokumen Dan Laporan Yang Disusun Terkait SAKIP Dan Dokumen Lainnya	Dokumen	5	Bag. PERENCANAAN	100	5				
	IKU.7	Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, Dan Koordinasi Terkait SAKIP Dan Dokumen Lainnya	Kegiatan	50	Bag. PERENCANAAN	100	50				
	IKU.8	Jumlah Studi Dan Kajian Yang Disusun	Dokumen	2	Bag. PERENCANAAN	100	2				
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Akuntabel	IKU.9	Jumlah Dokumen Dan Laporan Keuangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Disusun	Dokumen	302	Bag. PERENCANAAN	100	302	1. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di Lingkungan DITJEN HUBLA 2. Pemutakhiran Data PNBP di Lingkungan DITJEN HUBLA 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan dan Semester I	1. Pemutakhiran Data PNBP (1.463.690.000), Pemutakhiran Data PNBP Semester II (1.804.490.000) 2. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di Lingkungan DITJEN HUBLA (5.868.593.000) 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan (2.087.124.000) dan Semester I (1.123.060.000)	1. Pemutakhiran Data PNBP (1.457.988.300), Pemutakhiran Data PNBP Semester II (1.800.578.315) 2. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di Lingkungan DITJEN HUBLA (5.824.740.400) 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan (2.067.410.500) dan Semester I (1.121.162.500)	
	IKU.10	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi Di Bidang Keuangan	Kegiatan	2	Bag. KEUANGAN	200	4	1. Pembinaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada bulan Maret dan April Tahun 2019 2. Kegiatan koordinasi dilakukan terkait Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan, baik Inspektorat Jenderal (dilakukan pada bulan Januari, Juli, dan Oktober, Desember) maupun BPK (Desember)	1. Pembinaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1.028.080.000) 2. Kegiatan koordinasi dilakukan terkait Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan, baik Inspektorat Jenderal maupun BPK (1.076.143.000)	1. Pembinaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (887.845.000) 2. Kegiatan koordinasi dilakukan terkait Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan, baik Inspektorat Jenderal maupun BPK (1.055.808.400)	
	IKU.11	Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Di Bidang Keuangan	Kegiatan	6	Bag. KEUANGAN	100	6	1. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di Lingkungan DITJEN HUBLA 2. Pemutakhiran Data PNBP di Lingkungan DITJEN HUBLA 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan dan Semester I	1. Pemutakhiran Data PNBP (1.463.690.000), Pemutakhiran Data PNBP Semester II (1.804.490.000) 2. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di Lingkungan DITJEN HUBLA (5.868.593.000) 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan (2.087.124.000) dan Semester I (1.123.060.000)	1. Pemutakhiran Data PNBP (1.457.988.300), Pemutakhiran Data PNBP Semester II (1.800.578.315) 2. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di Lingkungan DITJEN HUBLA (5.824.740.400) 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan (2.067.410.500) dan Semester I (1.121.162.500)	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	KINERJA (%)	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
Terlaksananya Fungsi Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dan Bimtek Terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	Bag. KEPEGAWAIAN	125	10			
	IKU.13	Jumlah Penerbitan SK Mutasi/ Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional	SK	4142	Bag. KEPEGAWAIAN	147,9	6127	1. Inventarisasi dan validasi data dalam rangka evaluasi mutasi pindah tugas pegawai	Rp. 279000500	Rp. 2790005000
								2. Inventarisasi dan validasi data dalam rangka kenaikan pangkat di Lingkungan Ditjen Hubla	Rp. 140.700.000	Rp. 136.970.000
								3. Pelaksanaan proses pemberkasan kenaikan pangkat terpadu	Rp. 457.760.000	Rp. 455.198.250
								4. Penetapan angka kredit Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas keselamatan Pelayaran (PKP) ke UPT Ditjen Hubla	Rp. 531.879.000	Rp. 521.833.150
IKU.14	Persentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai Yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	%	100	Bag. KEPEGAWAIAN	100	100	Pemeriksaan dan Penanganan disiplin Pegawai Negeri Sipil	Rp. 1.284.662.000	Rp. 1.272.332.000	
Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan Yang Ditetapkan	Dokumen	10	Bag. HUKUM DAN KSLN	90	9			
	IKU.16	Jumlah Peraturan Perundangan Yang Telah Di Sosialisasikan	Dokumen	8	Bag. HUKUM DAN KSLN	62,5	5			
	IKU.17	Jumlah Penyelesaian Perkara	Dokumen	5	Bag. HUKUM DAN KSLN	40	2			
Meningkatnya Kerjasama Nasional Dan Internasional	IKU.18	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	6	Bag. HUKUM DAN KSLN	150	9			
	IKU.19	Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral	Dokumen	2	Bag. HUKUM DAN KSLN	0	0			
	IKU.20	Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional Dan Internasional	Kegiatan	18	Bag. HUKUM DAN KSLN	77,78	14			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	KINERJA (%)	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan Dan Penatausahaan	IKU.21	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	%	100	Bag. UMUM DAN PERLENGKAPAN	93,05	93,05	Biaya Rumah Tangga Kantor	Rp. 456.856.000	Rp. 294.283.000
								Sertifikat Kapal Penangkap Ikan Ditkappel	Rp. 188.500.000	Rp. 67.980.000
	Sertifikat kelaiklautan	Rp. 1.953.550.000	Rp. 1.070.646.500							
IKU.22	Persentase Pelaksanaan Administrasi Dan	%	100	Bag. UMUM DAN PERLENGKAPAN	85,73	85,73	- Perengkapan Kantor	Rp. 470.650.000	Rp.193.831.000	
							Jamuan Pelantikan dan serah Terima Jabatan	Rp. 565.435.000	Rp. 219.125.000	
IKU.23	Nilai BMN Pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	59.137.268.800.155	Bag. KEUANGAN	94,12	55.661.604.024.873	Alat Pengolah data, Monitoring, Penyuluhan dan Pembinaan sistim administrasi perkantoran, Evaluasi dan pembinaan Penghapusan BMN,	Rp. 59.137.268.800.155	Rp. 55.661.604.024.873	
Meningkatnya Kinerja Kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	Kegiatan	5	Bag. ORGANISASI DAN HUMAS	100	5			
	IKU.25	Jumlah Kegiatan Kehumasan Dan Protokol	Kegiatan	14	Bag. ORGANISASI DAN HUMAS	114,29	16			
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Pemeliharaan Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Kegiatan	2	Bag. ORGANISASI DAN HUMAS	150	3			
Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Sosialisasi Terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4	Bag.ORGANISASI DAN HUMAS	100	4			
	IKU.28	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2	Bag. ORGANISASI DAN HUMAS	0	0			
Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Kompeten Dan Profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Mengikuti Diklat / Bimtek	Orang	133	Bag. KEPEGAWAIAN	100	133			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	KINERJA (%)	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah Sistem Dan Informasi Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1	Bag. ORGANISASI DAN HUMAS	100	1			
	IKU.31	Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9	Bag. ORGANISASI DAN HUMAS	88,89	8			
Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	Dokumen	5	Bag. PERENCANAAN	100	5			
Terkelolanya Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Secara Optimal	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	91,09	Bag. KEUANGAN	103,63	94,4	Penyerapan Anggaran Kantor Pusat DITJEN HUBLA TA.2019	Rp 407.139.244.000	Rp 384.343.937.489
	IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	91,09	Bag. KEUANGAN	113,77	103,63	Monitoring Realisasi Daya Serap	Rp 407.139.244.000	Rp 384.343.937.489
	IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3.938.416.805.293	Bag. KEUANGAN	74,36	2.928.729.182.276	Pengembangan Monitoring Data Simak BMN		Rp 2.928.729.182.276
	IKU.36	Target PNPB Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	61.792.762.561	Bag. KEUANGAN	138,69	85.328.279.782	Monitoring Realisasi Target PNPB TA. 2019		Rp 85.328.279.782

II.5 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2018 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019**

NO	URAIAN	PAGU (Rp. 000)	REALISASI (Rp. 000)
1	Belanja Pegawai	115.128.971.000	112.218.097.687
2	Belanja Barang	272.138.122.000	253.508.435.202
3	Belanja Modal	19.872.151.000	18.617.404.600
	TOTAL PAGU	407.139.244.000	
	TOTAL REALISASI		384.343.937.489
	TOTAL SISA DANA		22.795.306.511

Sumber Data : *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



BAB IV

PENUTUP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019

IV.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2019 ini, antara lain peningkatan jumlah dokumen untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis serta peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat. Namun demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagian besar belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih dalam proses lelang dan proses pelaksanaan kegiatan.

Penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2019 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Kementerian Perhubungan secara umum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya. Selain itu, sinergi antara dukungan kemampuan SDM dengan layanan informasi yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2019 ini.

IV.2 Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari dukungan jajaran seluruh unit kerja yang ada serta diperlukan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



RENCANA KINERJA TAHUNAN

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan memuat beberapa indikator kinerja serta target yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.

Jakarta,

2019

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



ARIF TOHA

**Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003**

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Target 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Customer Perspectives					
SS.1	Terselenggaranya administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase peningkatan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
		IKU.2	Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.3	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert 1-5</i>).	Nilai	4
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	87
		IKU.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
Internal Business Process Perspective					
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5
		IKU.7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Kegiatan	50
		IKU.8	Jumlah studi dan kajian yang disusun	Dokumen	2
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akuntabel	IKU.9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disusun	Dokumen	302
		IKU.10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
		IKU.11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah penyelenggaraan diklat dan bimtek terkait peningkatan kompetensi	Kegiatan	8
		IKU.13	Jumlah penerbitan SK mutasi/ kenaikan pangkat/ jabatan fungsional	SK	4142
		IKU.14	Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	100
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20
		IKU.16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8
		IKU.17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6
		IKU.19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2
		IKU.20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Kegiatan	18
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	IKU.21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100
		IKU.22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100
		IKU.23	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	54.178.537.670.155
SS.8	Meningkatnya kinerja kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	5
		IKU.25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14
SS.9	Meningkatnya kinerja pengelolaan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2
SS.10	Terlaksananya fungsi manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4
		IKU.28	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2

Learn and Growth Perspective

SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	30
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1
		IKU.31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9
SS.13	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di S Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.14	Terkelolanya anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara Optimal	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	17.474.651.000
		IKU.36	Target PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	65.160.761.000

Jakarta, 2019
**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
 PERHUBUNGAN LAUT**



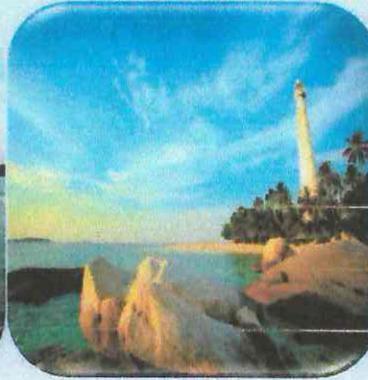
ARIF TOHA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670320 199203 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang, mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



ARIF TOHA

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670320 199203 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


R. AGUS H. PURNOMO

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


ARIF TOHA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670320 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		Satuan	Target 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<i>Customer Perspectives</i>					
SS.1	Terselenggaranya administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase peningkatan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
		IKU.2	Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.3	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert 1-5</i>).	Nilai	
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	87
		IKU.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
<i>Internal Business Process Perspective</i>					
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5
		IKU.7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Kegiatan	50
		IKU.8	Jumlah studi dan kajian yang disusun	Dokumen	2
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akuntabel	IKU.9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disusun	Dokumen	302
		IKU.10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
		IKU.11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah penyelenggaraan diklat dan bimtek terkait peningkatan kompetensi	Kegiatan	8
		IKU.13	Jumlah penerbitan SK mutasi/ kenaikan pangkat/ jabatan fungsional	SK	4142
		IKU.14	Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	100
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20
		IKU.16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8
		IKU.17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6
		IKU.19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2
		IKU.20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Kegiatan	18
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	IKU.21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100
		IKU.22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100
		IKU.23	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	54.178.537.670.155
SS.8	Meningkatnya kinerja kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	5
		IKU.25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14
SS.9	Meningkatnya kinerja pengelolaan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2
SS.10	Terlaksananya fungsi manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4
		IKU.28	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2
<i>Learn and Growth Perspective</i>					

Learn and Growth Perspective					
SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	30
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1
		IKU.31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9
SS.13	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.14	Terkelolanya anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara Optimal	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	17.474.651.000
		IKU.36	Target PNBPN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	56.160.761.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
(empat ratus tiga puluh dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

432.667.241.000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


R. AGUS H. PURNOMO

Jakarta, 2019
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


ARIF TOHA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670320 199203 1 003

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		Satuan	Target 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Costumer Perspectives					
SS.1	Terselenggaranya administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase peningkatan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
		IKU.2	Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.3	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert</i> 1-5).	Nilai	
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	87
		IKU.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90.50
Internal Business Process Perspective					
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5
		IKU.7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Kegiatan	50
		IKU.8	Jumlah studi dan kajian yang disusun	Dokumen	2
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akuntabel	IKU.9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disusun	Dokumen	302
		IKU.10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
		IKU.11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah penyelenggaraan diklat dan bimtek terkait peningkatan kompetensi	Kegiatan	15
		IKU.13	Jumlah penerbitan SK mutasi/ kenaikan pangkat/ jabatan fungsional	SK	4998
		IKU.14	Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	100
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20
		IKU.16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8
		IKU.17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6
		IKU.19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2
		IKU.20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Kegiatan	18
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	IKU.21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100
		IKU.22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100
		IKU.23	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	59.137.268.800.155
SS.8	Meningkatnya kinerja kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	5
		IKU.25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14
SS.9	Meningkatnya kinerja pengelolaan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2
SS.10	Terlaksananya fungsi manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4
		IKU.28	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Target 2019
<i>Learn and Growth Perspective</i>				
SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti diklat/bimtek	Orang 30
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit 1
		IKU.31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai 9
SS.13	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di SSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen 5
SS.14	Terkelolanya anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara Optimal	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	% 91,09
		IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	% 91,09
		IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp 3.938.416.805.293
		IKU.36	Target PNPB Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp 61.792.762.561

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
(empat ratus lima belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

415.341.266.000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jakarta, 2019
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003